



# LAPORAN KINERJA 2020

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**LPMP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jln. Panjtilar Negara No. 08, Taman Sari,  
Ampenan, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat. 83114.







## Kata Pengantar

Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Assalamu'alaiikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja LPMP Prov. NTB Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala LPMP Prov. NTB terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 43 Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Prov. NTB terhadap 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan, dengan menjalankan 7 (tujuh) fungsi LPMP. Ketujuh fungsi tersebut merupakan penjabaran tujuan kegiatan yang tertuang secara detail dalam program/kegiatan guna merealisasikan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2020. Masing-masing program/kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja, sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel.

Upaya percepatan pencapaian target, telah didukung oleh penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik yang menunjukkan kinerja yang signifikan melalui implementasi penguatan sistem manajemen mutu dan prosedur perencanaan, koordinasi, pengelolaan anggaran, pengelolaan BMN, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kami menyadari bahwa tantangan dan permasalahan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih cukup banyak dan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Hadirnya laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Prov. NTB selama tahun 2020 dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan, pelaksanaan program, dan perumusan kebijakan penjaminan mutu pendidikan di masa mendatang, serta menjadi pertanggungjawaban dan pemacu peningkatan kinerja bagi seluruh elemen organisasi LPMP Prov. NTB. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami ucapkan terima kasih.

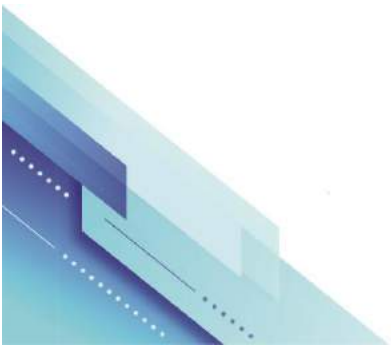
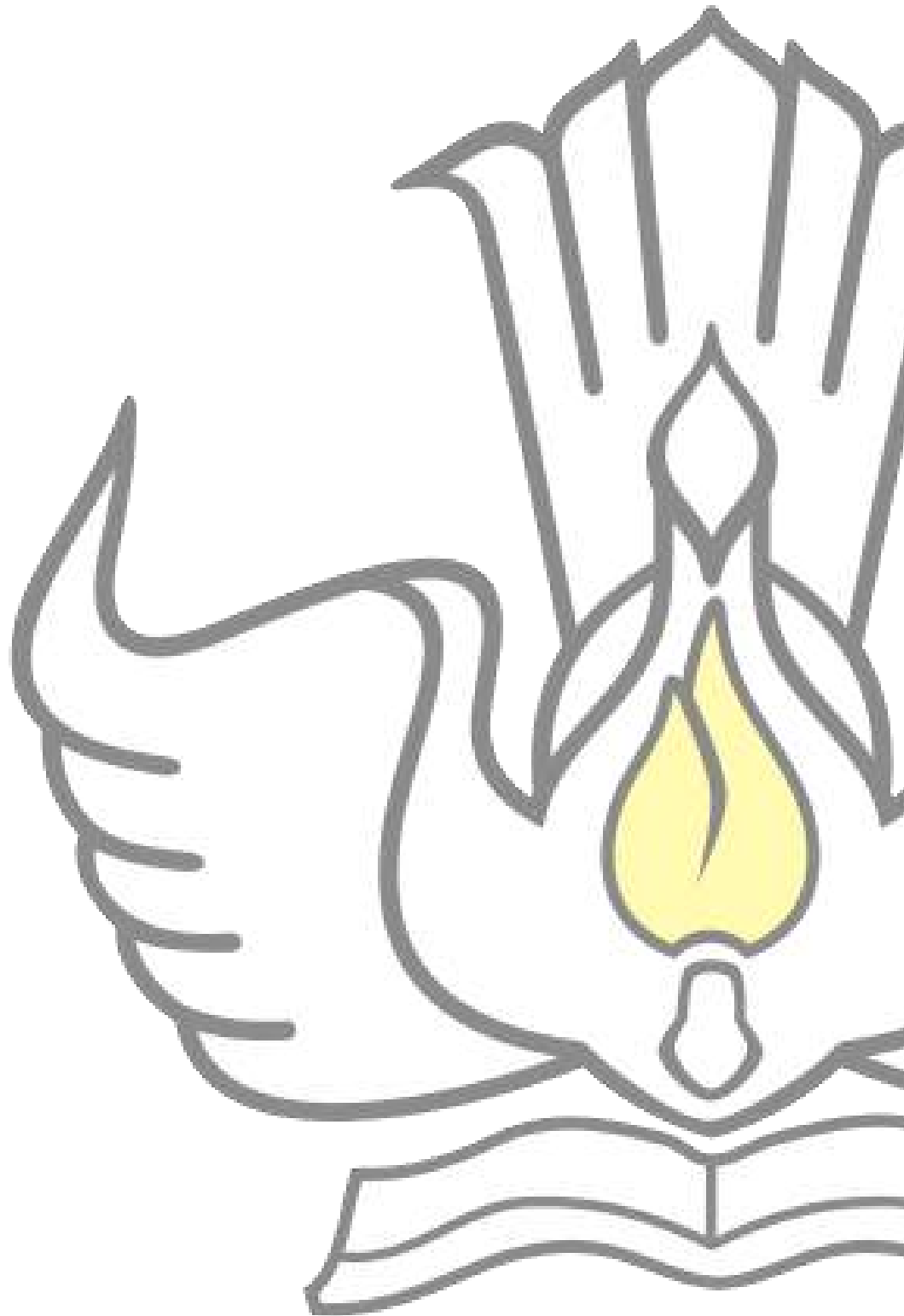
Ditaram, 25 Januari 2021

Kepala LPMP Prov. NTB,



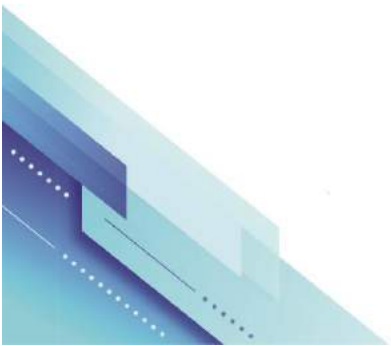
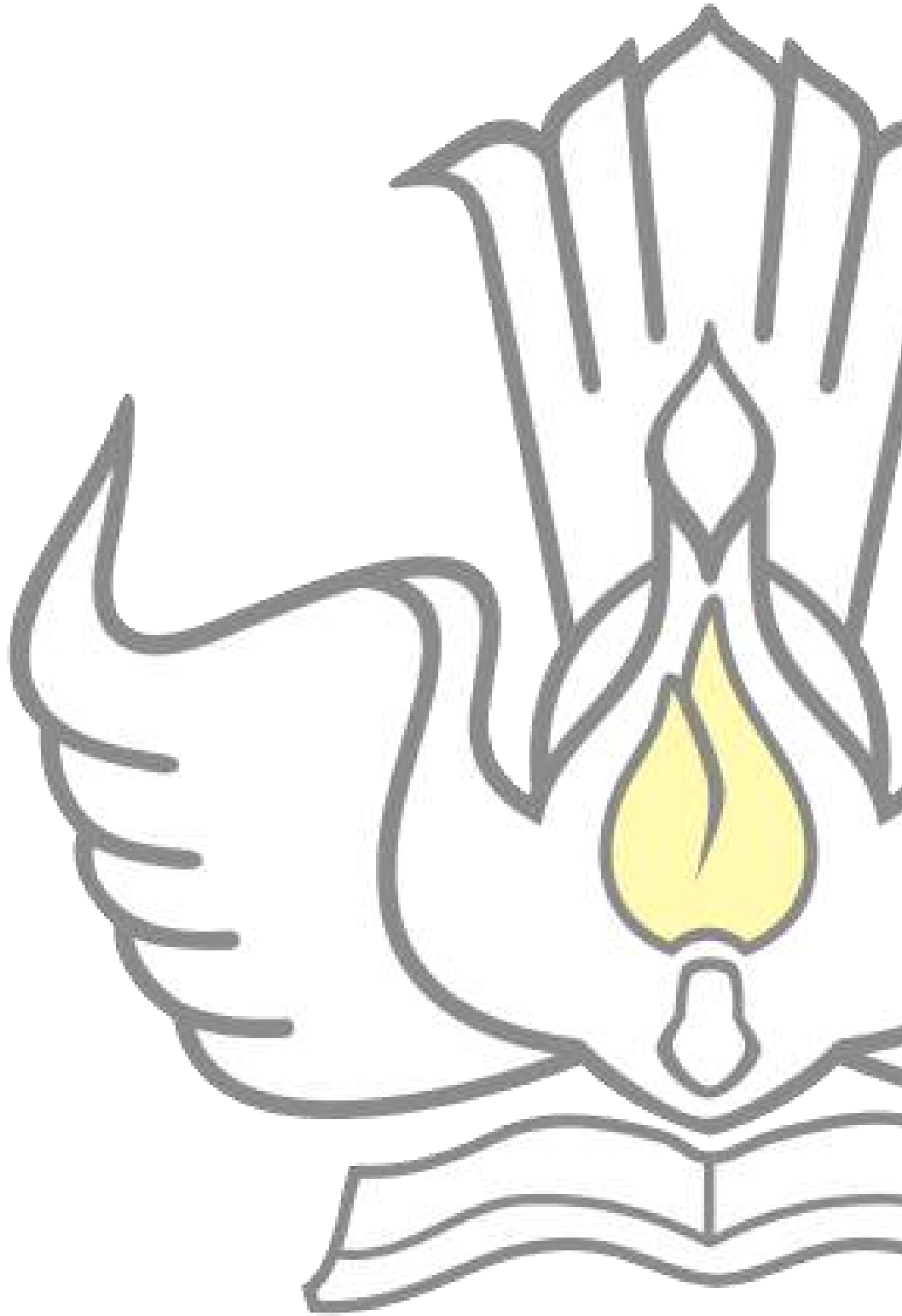
Mohamad Mustari, M.M., M.A., Ph.D.

NIP. 196404111986031003



# Daftar Isi

		Kata Pengantar ..... i
		Daftar Isi ..... ii
		Ikhtisar Eksekutif ..... iii
<b>1</b>	<b>Bab I</b> <b>Pendahuluan</b> <i>Menyajikan informasi umum dan permasalahan terkait dengan LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, dasar hukum dan permasalahan.</i>	
		<b>7</b>
		<b>Bab II</b> <b>Perencanaan Kinerja</b> <i>Menyajikan ringkasan perencanaan kinerja dan ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.</i>
<b>9</b>	<b>Bab III</b> <b>Akuntabilitas Kinerja</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian Kinerja LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.</li><li>• Realisasi Anggaran.</li></ul>	
		<b>35</b>
		<b>Bab IV</b> <b>Penutup</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampiran</li></ul>



## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian dua sasaran kegiatan dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian satu sasaran kegiatan dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta satu sasaran kegiatan dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seperti yang tertuang pada Rencana Strategis. Tingkat ketercapaian IKK lebih detail diuraikan pada Bab III.



Gambar 1. Capaian IKK Tahun 2020.

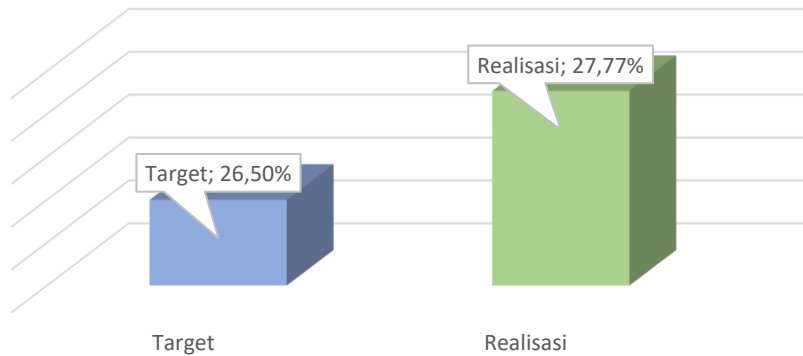
Dari gambar 1. seluruh IKK Sasaran Kegiatan LPMP Prov. NTB melampaui target yaitu: IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75; IKK 1.1 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk; IKK 1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan; IKK 2.1 Predikat SAKIP LPMP Prov. Nusa Tenggara Barat; dan IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan RKA-K/L.



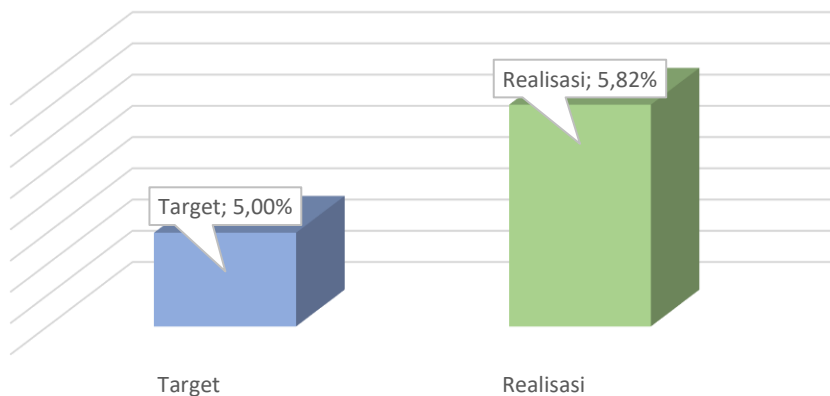
Gambar 2. Realisasi Penyerapan Anggaran LPMP Prov. NTB tahun 2020.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

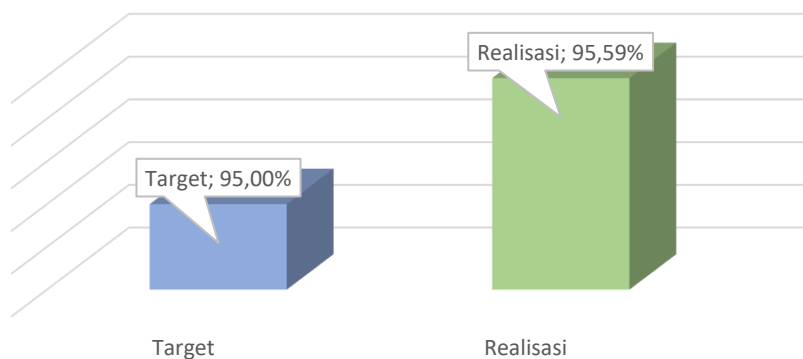
IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75.



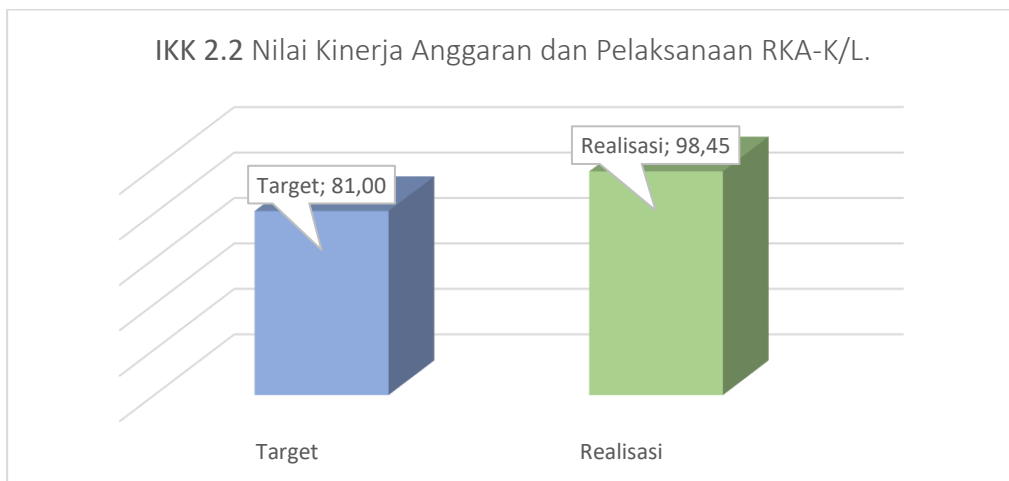
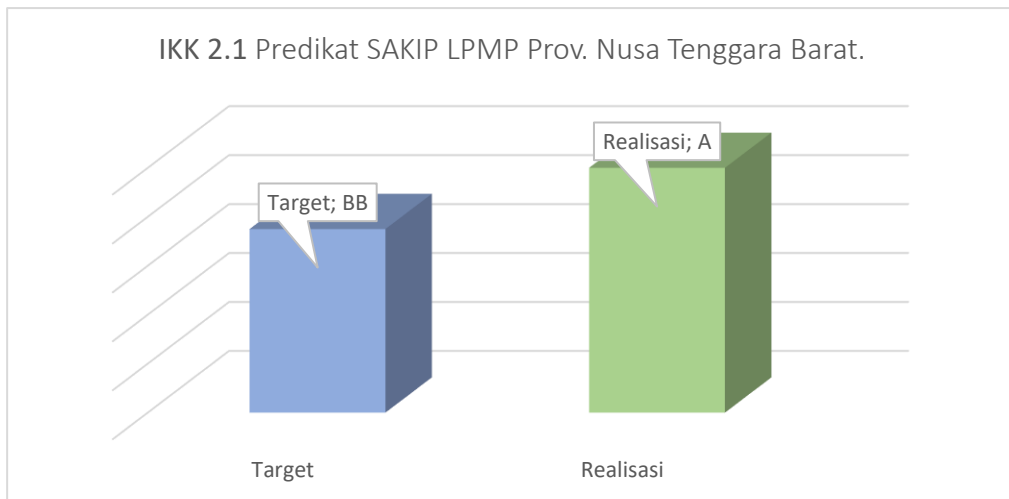
IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.



IKK 1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan.



Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya tata kelola LPMP Prov. Nusa Tenggara Barat yang baik.

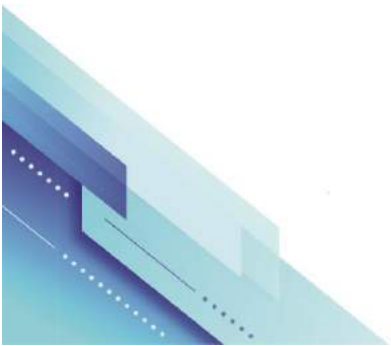
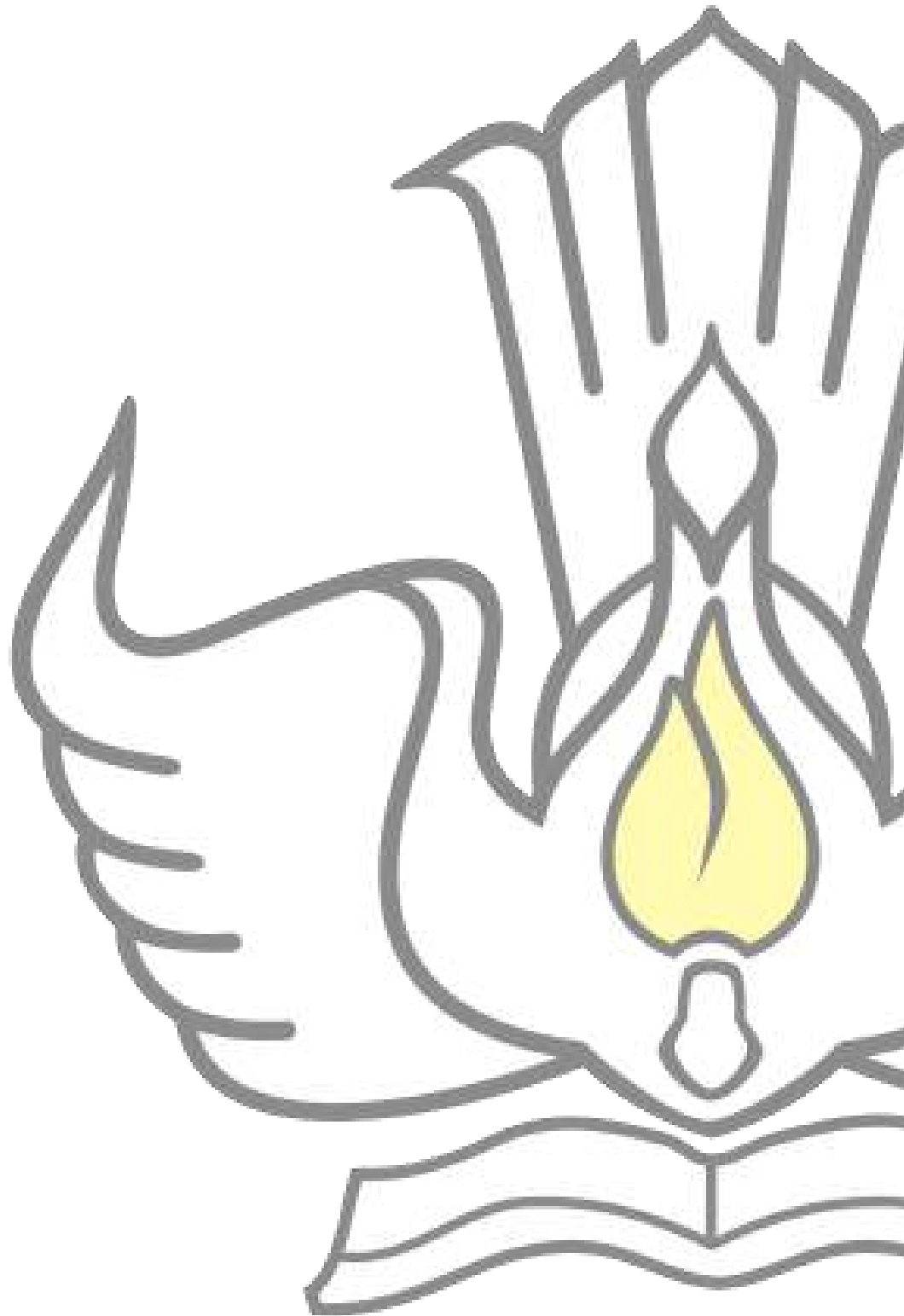


**Permasalahan :**

- 01 LPMP tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
- 02 Sistem pengumpulan dan pengolahan data mutu yang dikembangkan oleh unit utama belum bekerja secara optimal
- 03 Hasil pemetaan mutu belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyusun program dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di daerah

**Upaya Peyelesaian :**

- 01 Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan
- 02 Penyempurnaan sistem atau aplikasi pengumpulan dan pengolahan data mutu
- 03 Mendorong pemanfaatan data mutu dalam penyusunan program dan kebijakan daerah



# Bab I

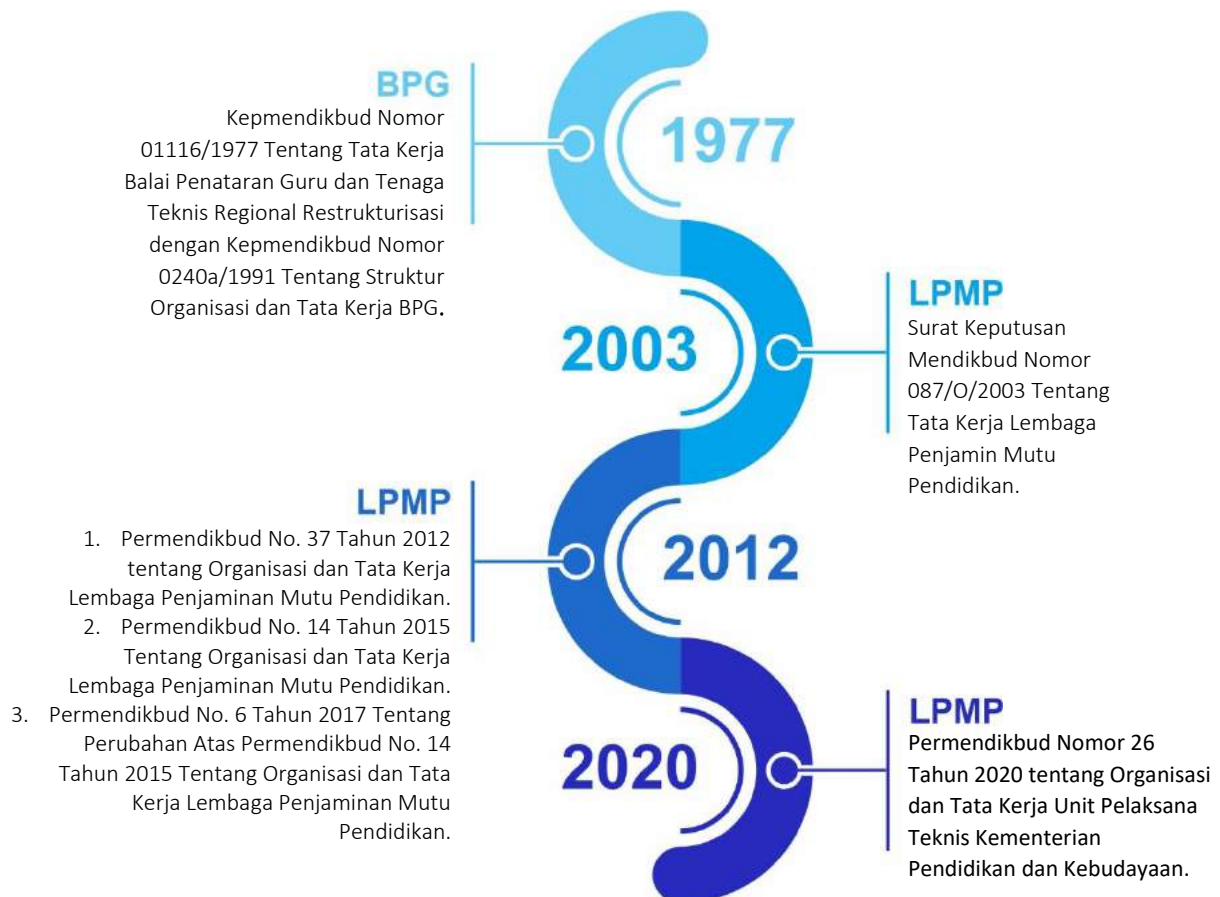
# Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi
- D. Isu Strategis dan Permasalahannya

# PENDAHULUAN

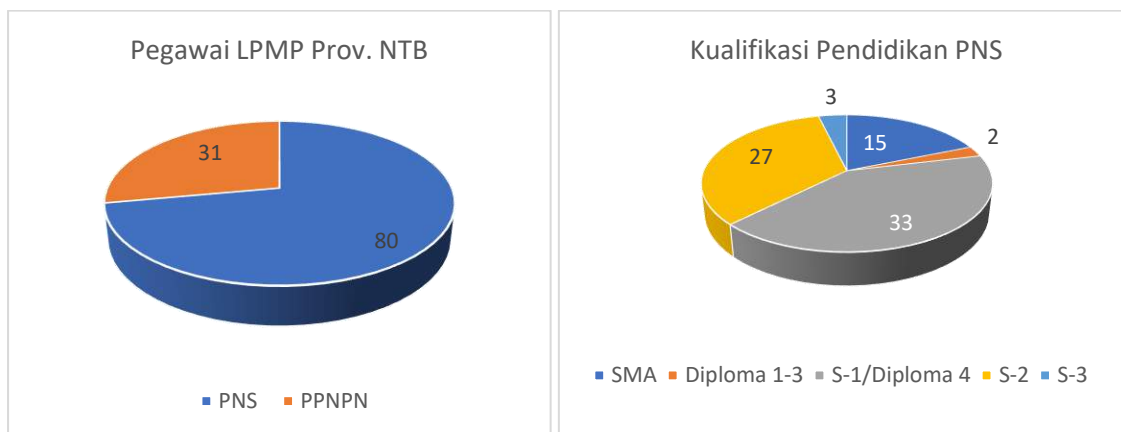
## A. Gambaran Umum.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang disebut LPMP Prov. NTB merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.



**Gambar 1.1.** Transformasi Kelembagaan LPMP Prov. NTB.

Profil sumber daya manusia LPMP Prov. NTB.



Data per 31 Desember 2020.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, disusun untuk memberikan penjelasan secara komprehensif tentang hal-hal berikut:

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Prov. NTB sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Memberikan rekomendasi secara komprehensif dan produktif untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam menopang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

## B. Dasar Hukum.

- 1 •Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2 •Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3 •Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4 •PermenagPan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.
- 5 •Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.
- 6 • Permendikbud Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan LPMP Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
- 7 •Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8 •Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Prov. NTB memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

### Tugas:

Melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### Fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pelaksanaan pendidika satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

### Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat



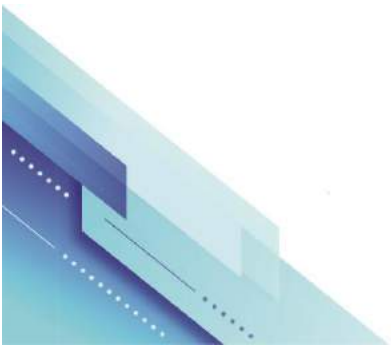
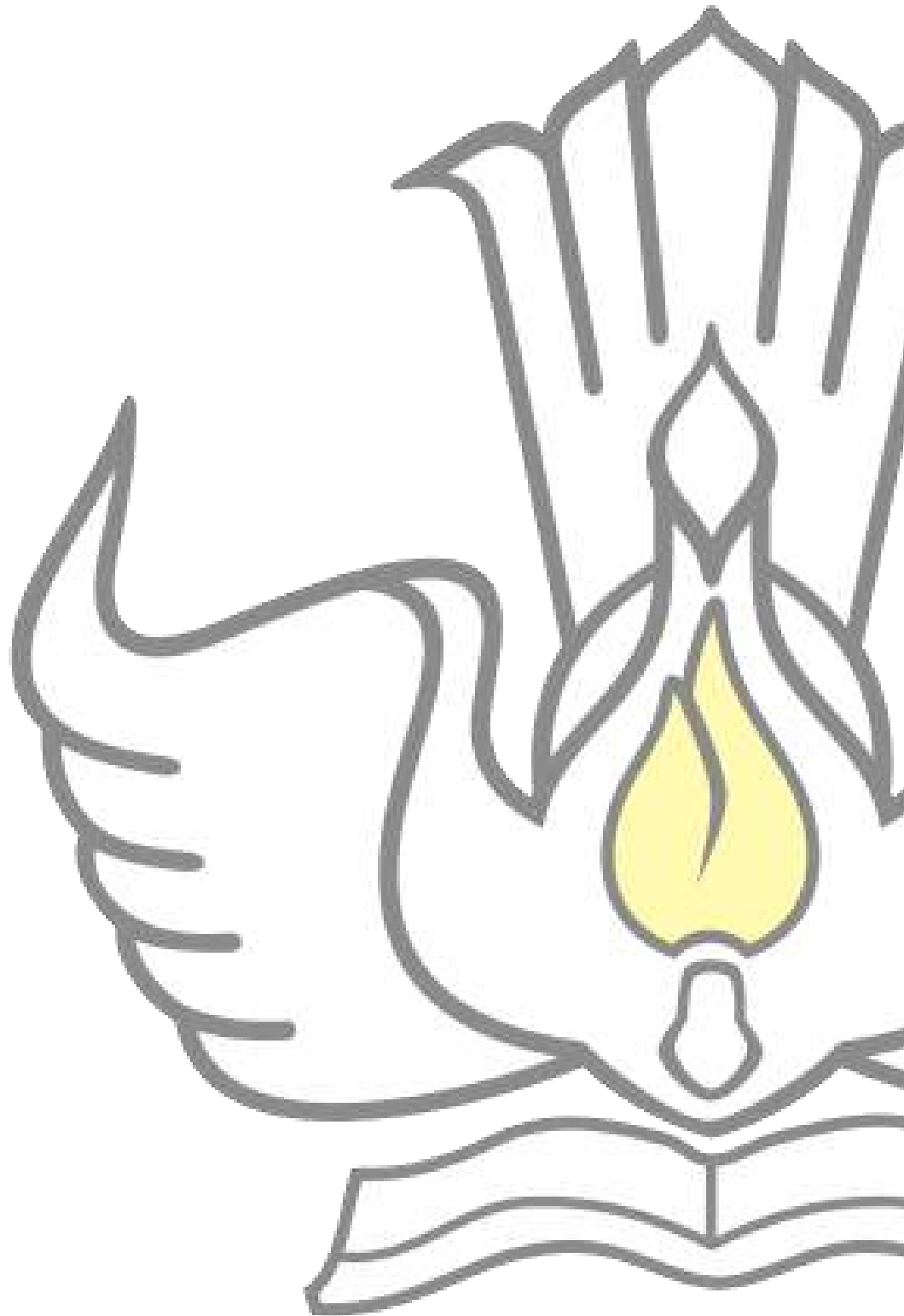
Gambar 1.2. Struktur Organisasi LPMP Prov. NTB.

#### D. Isu Strategis dan Permasalahan.



Gambar 1.3. Isu-isu strategis LPMP Prov. NTB.

Penentuan isu-isu strategis di atas mengacu pada hasil analisis Pemetaan Mutu Pendidikan semua jenjang satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019.



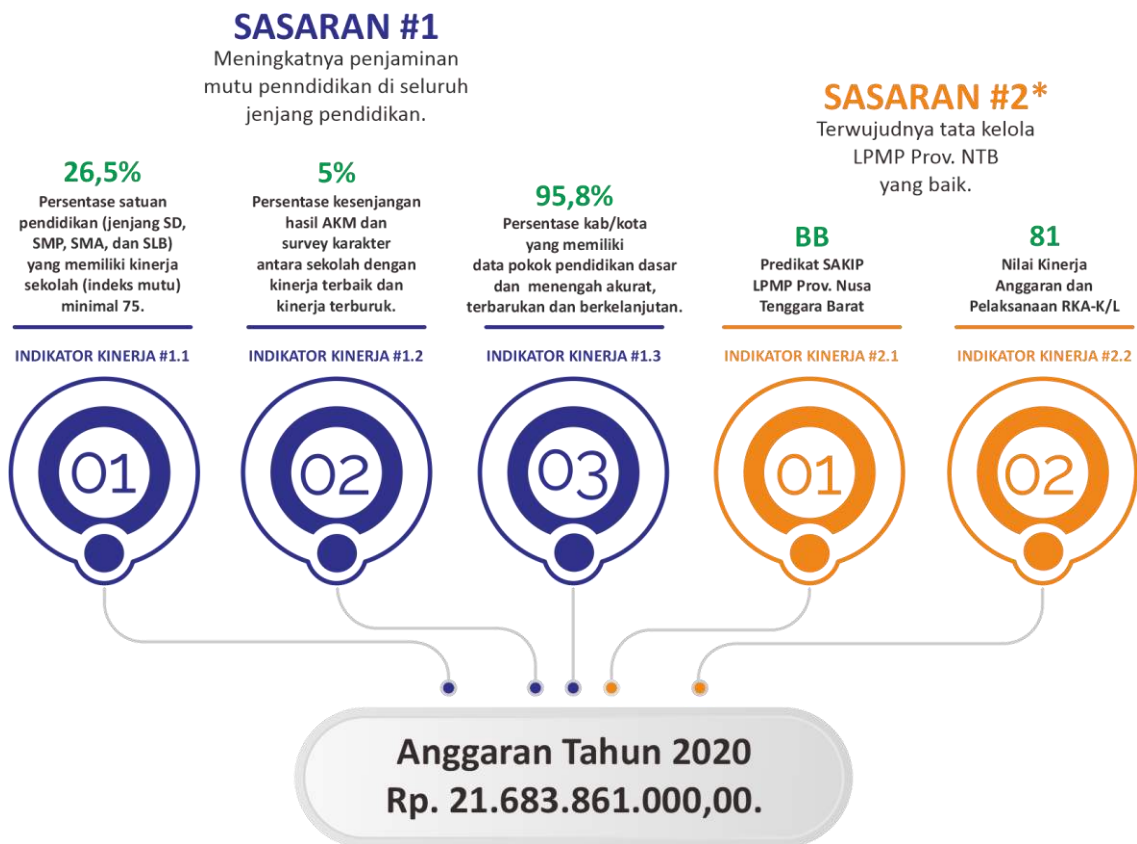
## Bab II

# Perencanaan Kinerja



# PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja LPMP Prov. NTB tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja LPMP Prov. NTB Tahun 2020

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020 LPMP Prov. NTB menetapkan 1 sasaran kegiatan “Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.” Dengan 3 (tiga) indikator untuk dicapai seperti pada gambar 2.1. diatas. Untuk sasaran kegiatan kedua “Terwujudnya tata kelola LPMP Prov. NTB yang baik.” tidak dicantumkan pada Perjanjian Kinerja karena belum terakomodir pada aplikasi **e-Kinerja** sampai saat laporan kinerja ini disusun, tetapi tetap harus dilaporkan guna memenuhi pentahapan target capaian kinerja yang tertuang pada rencana strategis LPMP Prov. NTB tahun 2020 sd. 2024.

## Bab III

# Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja LPMP Prov. NTB
- B. Realisasi Anggaran

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja LPMP Prov. NTB.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, LPMP Prov. NTB menetapkan satu sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja kegiatan untuk di capai ditambah dengan satu sasaran kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis LPMP Prov. NTB 2020-2024 yaitu Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik yang belum terakomodir pada sistem e-Kinerja.

Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020 dan pentahapan pada Rencana Strategis LPMP Prov. NTB 2020- 2024.

### Sasaran #1 Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

#### Indikator Kinerja #1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75.

**Tabel 3.1.** Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75.

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024	% capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%		
26,5%	27,77%	104,79%	30,1%	92,26%

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas pelaksanaan program LPMP Prov. NTB maka dibutuhkan analisis pencapaian dari masing- masing kinerja dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upaya LPMP Prov. NTB untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP dilakukan melalui kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil pemetaan mutu pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan, serta program inovasi melalui kemitraan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat.

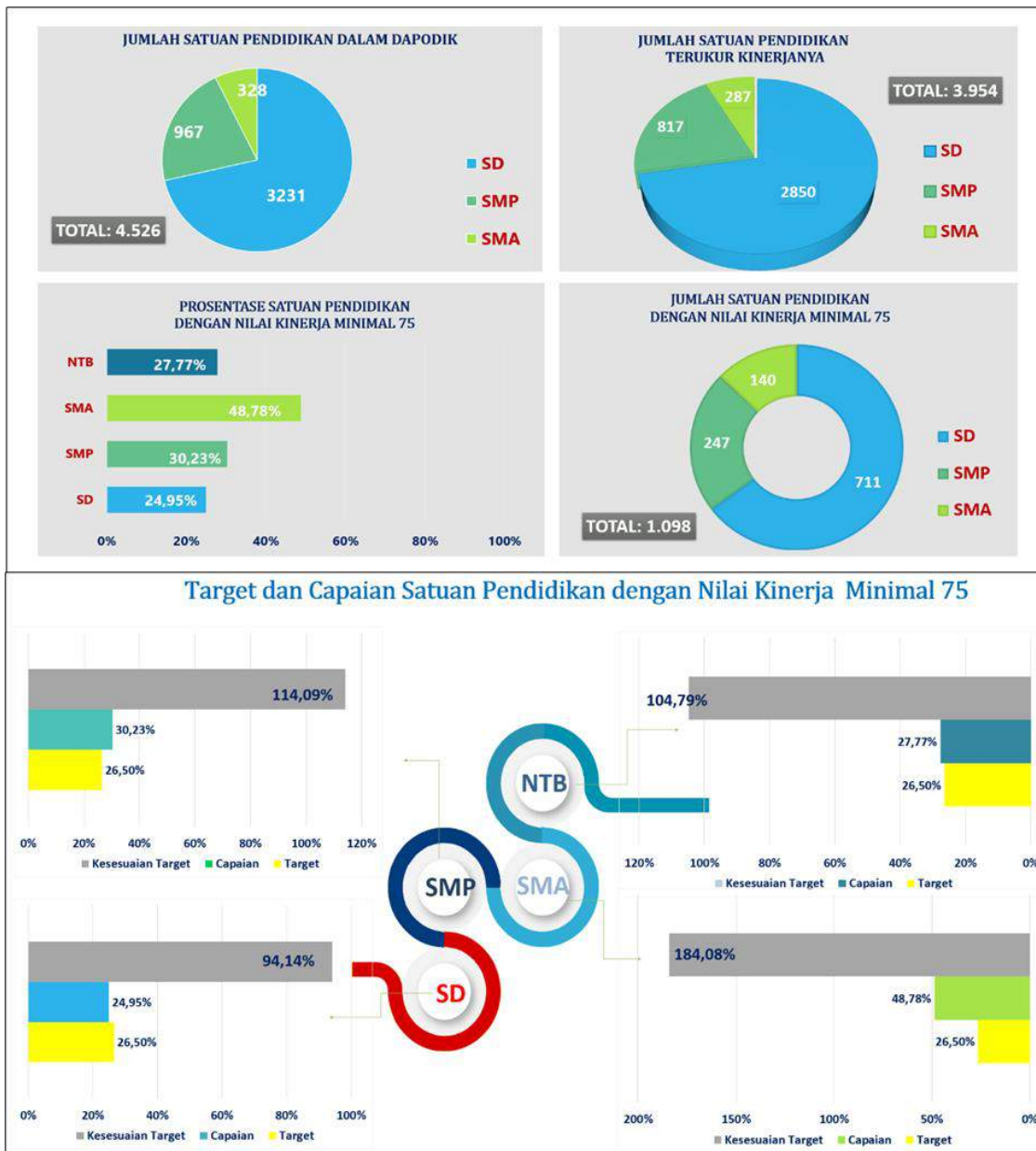
Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur kinerja LPMP NTB dalam program penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan (sekolah) dalam pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Target kinerja yang ditetapkan adalah Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang Memiliki Scorecard Minimal 75 sebesar 26,5%. Ukuran kinerja sekolah dalam memenuhi delapan SNP diambil dari hasil pemetaan mutu pendidikan.

Pemetaan mutu pendidikan merupakan proses yang terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan SNP pada satuan pendidikan. Pemetaan mutu diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian SNP dan selanjutnya menjadi ukuran kinerja satuan

pendidikan dalam memenuhi SNP. Kegiatan pemetaan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui evaluasi diri sekolah dengan mengisi instrumen pemetaan. Pemetaan ini dilakukan dengan melibatkan kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, perwakilan siswa, perwakilan orang tua siswa/komite sekolah, dan pengawas pembina sekolah tersebut.

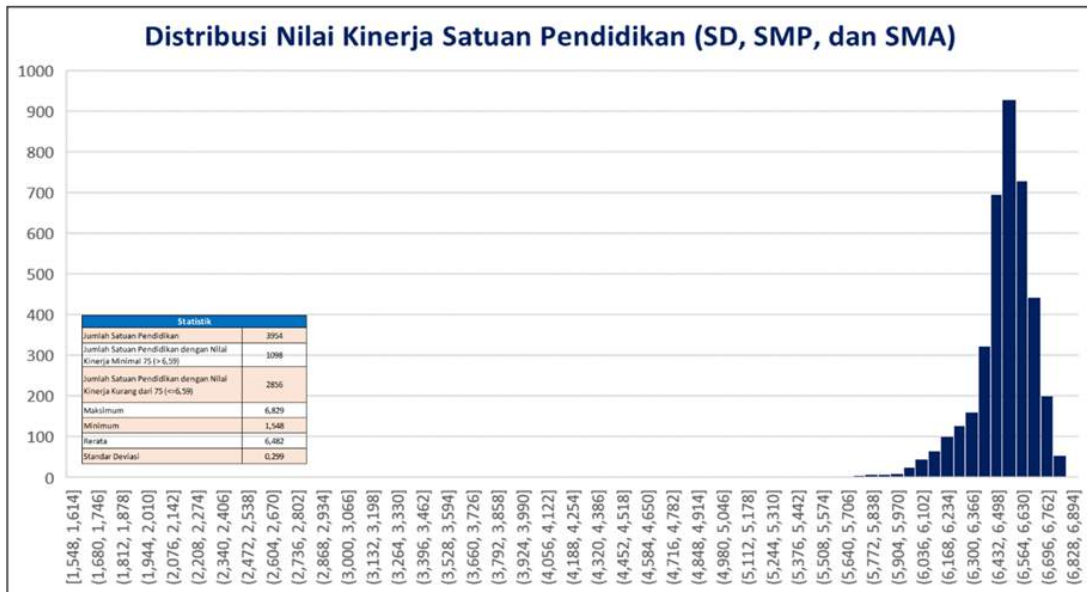
Pemetaan mutu dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah disusun mengacu delapan komponen SNP—Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, dan Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan—yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Instrumen pemetaan mutu terdiri atas dua jenis, yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data sekolah yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Data yang terkumpul dari kedua instrumen tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan peta mutu setiap satuan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk rapor mutu dengan rentang nilai 0 – 7.

Data rapor mutu yang digunakan untuk mengukur kinerja satuan pendidikan pada tahun 2020 adalah data rapor mutu yang dikumpulkan pada periode pengumpulan tahun 2019. Alasan penggunaan data rapor mutu tahun 2019 untuk mengukur kinerja satuan pendidikan yang selanjutnya untuk mengukur ketercapaian kinerja LPMP NTB pada IKK 1 adalah proses pemetaan mutu tahun 2019 selesai pada bulan Oktober 2020.



Gambar 3.1. Dashboard Capaian Nilai Kinerja Satuan Pendidikan.

Berdasarkan data satuan pendidikan yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), ada 4.526 satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Data ini di luar SLB karena SLB belum mulai mengisi instrumen peta mutu pada tahun 2019. Dari jumlah itu, sebanyak 3.954 satuan pendidikan yang berhasil keluar rapor mutunya (**Gambar 3.1.** bagian atas). Artinya, sebanyak 3.954 sekolah yang dapat diukur kinerjanya. Distribusi nilai kinerja setiap satuan pendidikan yang terukur kinerjanya ditunjukkan pada **Gambar 3.2.** Satuan pendidikan yang tidak keluar rapor mutunya disebabkan oleh beberapa hal: (1) satuan pendidikan tidak mengisi instrumen pemetaan karena sekolah tersebut baru berdiri, khususnya untuk jenjang SD; (2) satuan pendidikan tidak mengisi instrumen pemetaan sampai batas pengiriman ditutup; (3) data yang dikirim gagal diproses oleh sistem karena ketidaklengkapan data yang dikirim; (4) aplikasi yang sering bermasalah sehingga menyebabkan satuan pendidikan kesulitan dalam mengirim data.



**Gambar 3.2.** Distribusi Nilai Kinerja Satuan Pendidikan.

Berdasarkan data pada grafik yang ditunjukkan oleh **Gambar 3.2.**, rata-rata nilai kinerja seluruh satuan pendidikan yang terukur kinerjanya sebesar 6,482 dengan nilai tertinggi dan terendah masing-masing 6,829 dan 1,548. Nilai kinerja satuan pendidikan mayoritas terletak dekat dengan nilai rata-rata. Batas nilai kinerja satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai indikator meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan minimal 75 (setara dengan 6,59 dengan target 26,5% satuan pendidikan memiliki nilai lebih dari batas tersebut. Berdasarkan info grafik pada **Gambar 3.1.**, sebanyak 1.098 (27,77%) satuan pendidikan memiliki kinerja lebih dari standar minimal 6,59. Hasil ini melebihi target 26,5% atau kesesuaian target sebesar 104,79%.

**Tabel 3.2.** Target dan Capaian Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Kinerja Minimal 75 Setiap Kabupaten/Kota.

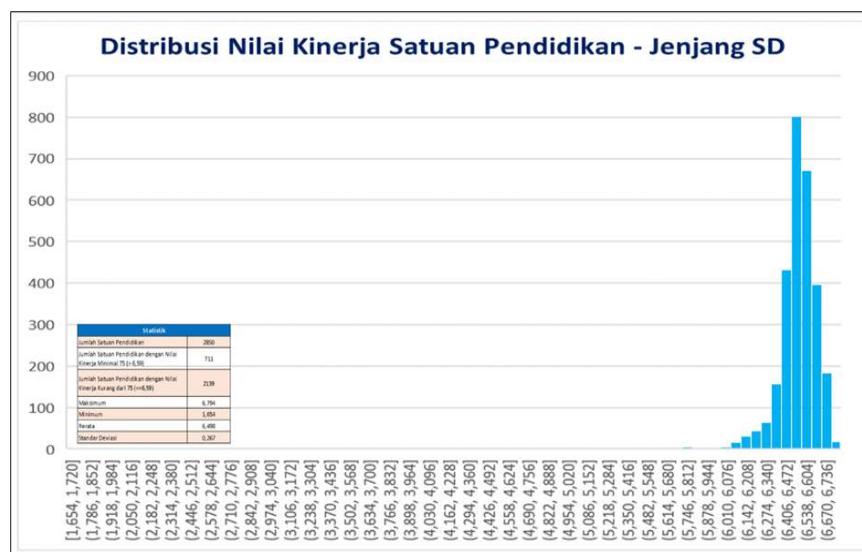
Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan dengan Nilai Kinerja Minimal 75	Target	Capaian	Kesesuaian Target
Kab. Bima	483	161	26,50%	33,33%	125,79%
Kab. Dompu	299	57	26,50%	19,06%	71,94%
Kab. Sumbawa	400	132	26,50%	33,00%	124,53%
Kab. Lombok Timur	1015	252	26,50%	24,83%	93,69%
Kab. Sumbawa Barat	140	69	26,50%	49,29%	185,98%
Kab. Lombok Tengah	716	163	26,50%	22,77%	85,91%
Kab. Lombok Utara	157	33	26,50%	21,02%	79,32%
Kab. Lombok Barat	404	106	26,50%	26,24%	99,01%
Kota Mataram	231	86	26,50%	37,23%	140,49%
Kota Bima	109	39	26,50%	35,78%	135,02%
Nusa Tenggara Barat	3954	1098	26,50%	27,77%	104,79%

**Tabel 3.2.** menunjukkan sebaran jumlah satuan pendidikan yang memiliki nilai kinerja lebih dari 6,59 (minimal 75). Ada 5 kabupaten yang memiliki capaian yang kurang dari 26,5%. Capaian paling rendah diperoleh oleh Kabupaten Dompu dengan capaian hanya 19,06% satuan pendidikan yang memiliki nilai kinerja lebih dari 6,59 atau capaian terhadap target sebesar 71,94%. Kabupaten

Lombok Utara menduduki capaian terendah kedua. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki nilai kinerja lebih dari 6,59 sebanyak 33 satuan pendidikan dari 157 satuan pendidikan atau sebesar 21,02% dengan kesesuaian target sebesar 79,32%. Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki prosentase satuan pendidikan dengan nilai kinerja lebih dari 6,59 paling tinggi, sebesar 49,29% atau 185,98% dari target 26,5%. Uraian lebih detail capaian kinerja setiap jenjang satuan pendidikan dijelaskan sebagai berikut.

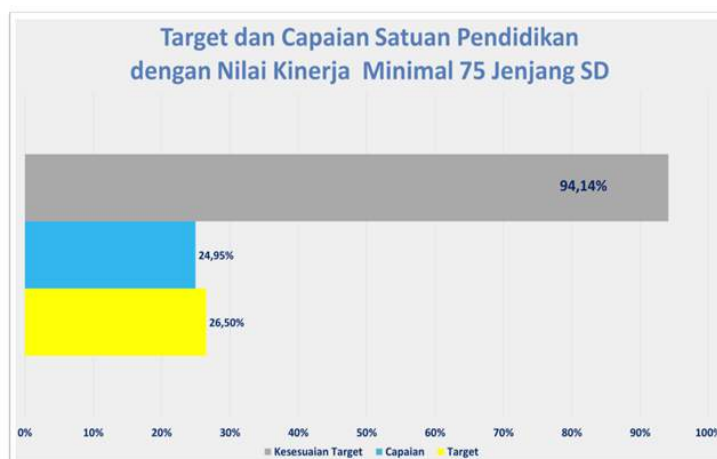
#### Satuan Pendidikan Jenjang SD yang Memiliki Scorecard Minimal 75.

Ada 2.850 satuan pendidikan jenjang SD yang berhasil diukur kinerjanya. Sebaran nilai kinerja seluruh satuan pendidikan SD ditampilkan pada **Gambar 3.3**. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh **Gambar 3.3** diperoleh informasi bahwa rata-rata nilai kinerja satuan pendidikan SD sebesar 6,498 dengan nilai kinerja minimum dan maksimum berturut-turut 1,654 dan 6,794. Sebanyak 62% satuan pendidikan memiliki nilai kinerja di atas rata-rata.



**Gambar 3.3.** Distribusi Satuan Pendidikan Jenjang SD.

Jika dibandingkan terhadap batas nilai kinerja 6,59 (minimal 75), ada 711 satuan pendidikan SD yang memiliki nilai kinerja di atas 6,59 atau sebesar 24,95%. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 26,5%. Artinya, capaian terhadap target sebesar 94,14% seperti ditunjukkan pada **Gambar 3.4**.



**Gambar 3.4.** Capaian Nilai Kinerja Satuan Pendidikan Jenjang SD

Sebaran tingkat capaian kinerja satuan pendidikan jenjang SD pada setiap kabupaten/kota ditampilkan pada **Tabel 3.3**. Ada 5 kabupaten/kota yang memiliki prosentase satuan pendidikan dengan capaian di bawah target 26,5%. Kabupaten Dompu memiliki jumlah SD paling sedikit yang memiliki nilai kinerja di atas 6,59 sebanyak 14,02%, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki prosentase paling tinggi sebesar 46,00%.

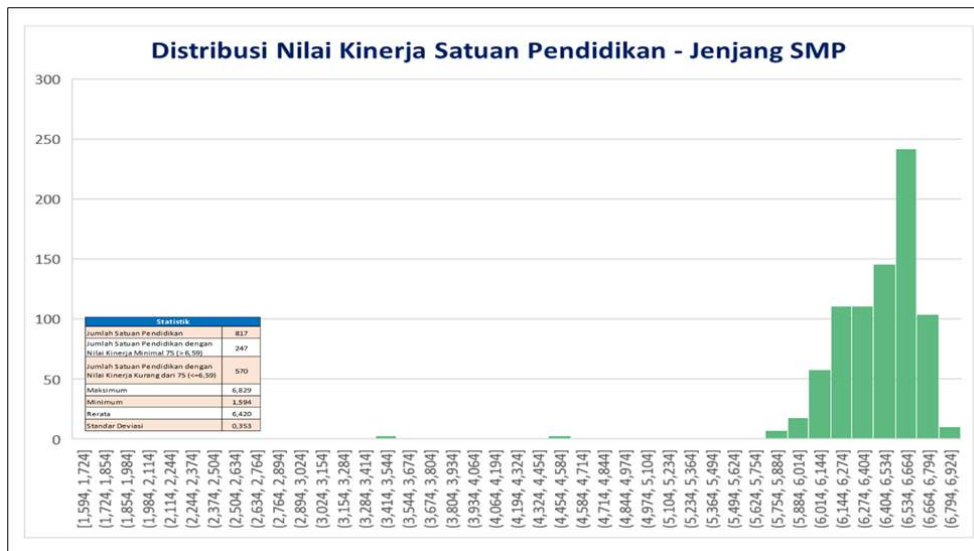
**Tabel 3.3.** Target dan Capaian Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Kinerja Minimal 75 Jenjang SD Setiap Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan dengan Nilai Kinerja Minimal 75	Target	Capaian	Kesesuaian Target
Kab. Bima	339	103	26,50%	30,38%	114,65%
Kab. Dompu	214	30	26,50%	14,02%	52,90%
Kab. Sumbawa	284	77	26,50%	27,11%	102,31%
Kab. Lombok Timur	728	181	26,50%	24,86%	93,82%
Kab. Sumbawa Barat	100	46	26,50%	46,00%	173,58%
Kab. Lombok Tengah	520	107	26,50%	20,58%	77,65%
Kab. Lombok Utara	118	25	26,50%	21,19%	79,95%
Kab. Lombok Barat	309	66	26,50%	21,36%	80,60%
Kota Mataram	166	54	26,50%	32,53%	122,76%
Kota Bima	72	22	26,50%	30,56%	115,30%
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2850</b>	<b>711</b>	<b>26,50%</b>	<b>24,95%</b>	<b>94,14%</b>

Target satuan pendidikan SD yang akan diukur kinerjanya pada tahun 2019 sebanyak 3.231 satuan pendidikan seperti yang terdaftar dalam Dapodik. Dari target tersebut, sebanyak 2.850 satuan pendidikan yang terukur kinerjanya. Sisanya sebanyak 381 satuan pendidikan tidak bisa diukur kinerjanya karena rapor mutu tidak keluar dengan sebab seperti ditunjukkan pada **Gambar 3.8**.

#### Satuan Pendidikan Jenjang SMP yang Memiliki Scorecard Minimal 75.

Sebanyak 817 satuan pendidikan jenjang SMP yang berhasil diukur kinerjanya (lihat data pada **Gambar 3.1**. bagian atas) dari 967 satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Sisanya sebanyak 150 satuan pendidikan SMP tidak terbit rapor mutunya sehingga ukuran nilai kinerja tidak dapat diperoleh. Penyebab satuan pendidikan tidak memiliki rapor mutu dapat dilihat pada **Gambar 3.8**. Berdasarkan data pada **Gambar 3.5**, sebaran nilai kinerja seluruh satuan pendidikan SMP mengelompok di sebelah kanan. Rata-rata nilai kinerja satuan pendidikan SMP sebesar 6,420 dengan nilai kinerja minimum dan maksimum berturut-turut 1,594 dan 6,829. Sebanyak 59% satuan pendidikan memiliki nilai kinerja di atas rata-rata.



**Gambar 3.5.** Distribusi Nilai Kinerja Satuan Pendidikan Jenjang SMP

Jika dibandingkan terhadap batas nilai kinerja 6,59 (minimal 75), sebanyak 247 satuan pendidikan SMP yang memiliki nilai kinerja di atas 6,59 atau sebesar 30,23%. Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 26,5%. Artinya, capaian terhadap target sebesar 114,09%. Jika dicermati capaian satuan pendidikan SMP pada 10 kabupaten/kota, sebaran data pada **Tabel 3.4**, Kabupaten Sumbawa Barat tetap pada posisi paling tinggi dengan 51,61% SMP memiliki nilai kinerja di atas 6,59. Sementara kabupaten Lombok Utara pada posisi paling rendah dengan prosentase SMP yang memiliki nilai kinerja di atas 6,59 hanya sebesar 11,11%, sangat jauh di bawah target 26,5%.

**Tabel 3.4.** Target dan Capaian Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Kinerja Minimal 75 Jenjang SD Setiap Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan dengan Nilai Kinerja Minimal 75	Target	Capaian	Kesesuaian Target
Kab. Bima	97	36	26,50%	37,11%	140,05%
Kab. Dompu	60	13	26,50%	21,67%	81,76%
Kab. Sumbawa	93	37	26,50%	39,78%	150,13%
Kab. Lombok Timur	232	48	26,50%	20,69%	78,07%
Kab. Sumbawa Barat	31	16	26,50%	51,61%	194,77%
Kab. Lombok Tengah	148	40	26,50%	27,03%	101,99%
Kab. Lombok Utara	27	3	26,50%	11,11%	41,93%
Kab. Lombok Barat	69	27	26,50%	39,13%	147,66%
Kota Mataram	38	17	26,50%	44,74%	168,82%
Kota Bima	22	10	26,50%	45,45%	171,53%
Nusa Tenggara Barat	817	247	26,50%	30,23%	114,09%

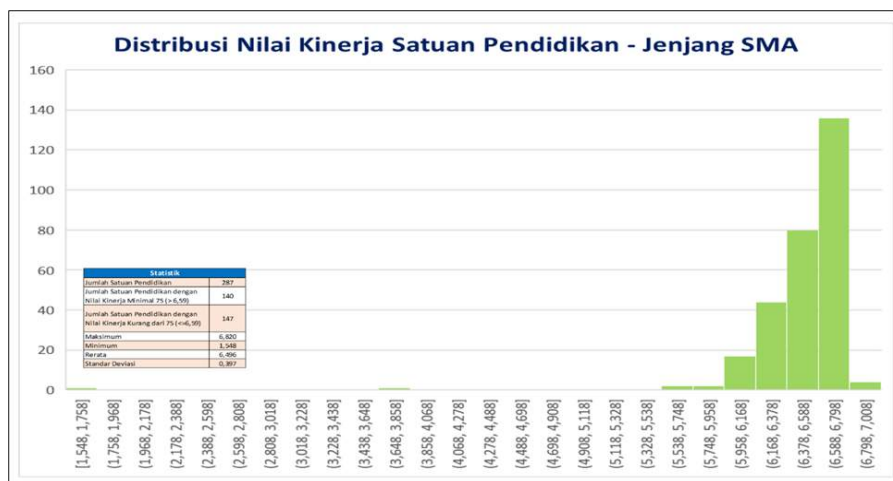
#### Satuan Pendidikan Jenjang SMA yang Memiliki Scorecard Minimal 75.

Secara umum, satuan pendidikan jenjang SMA memiliki capaian kinerja paling tinggi dibandingkan dengan jenjang SD dan SMP. Target yang ditetapkan sebagai indikator meningkatnya kinerja satuan pendidikan adalah 26,5% satuan pendidikan yang memiliki nilai kinerja minimal 75 (di atas 6,59). Capaian kinerja yang diperoleh pada jenjang SMA melebihi

target tersebut, yaitu 48,78% satuan pendidikan SMA yang memiliki nilai kinerja di atas 6,59. Artinya, capaian terhadap target sebesar 184,08%.



Gambar 3.6. Capaian Nilai Kinerja Satuan Pendidikan Jenjang SMA.



Gambar 3.7. Distribusi Nilai Kinerja Satuan Pendidikan Jenjang SMA

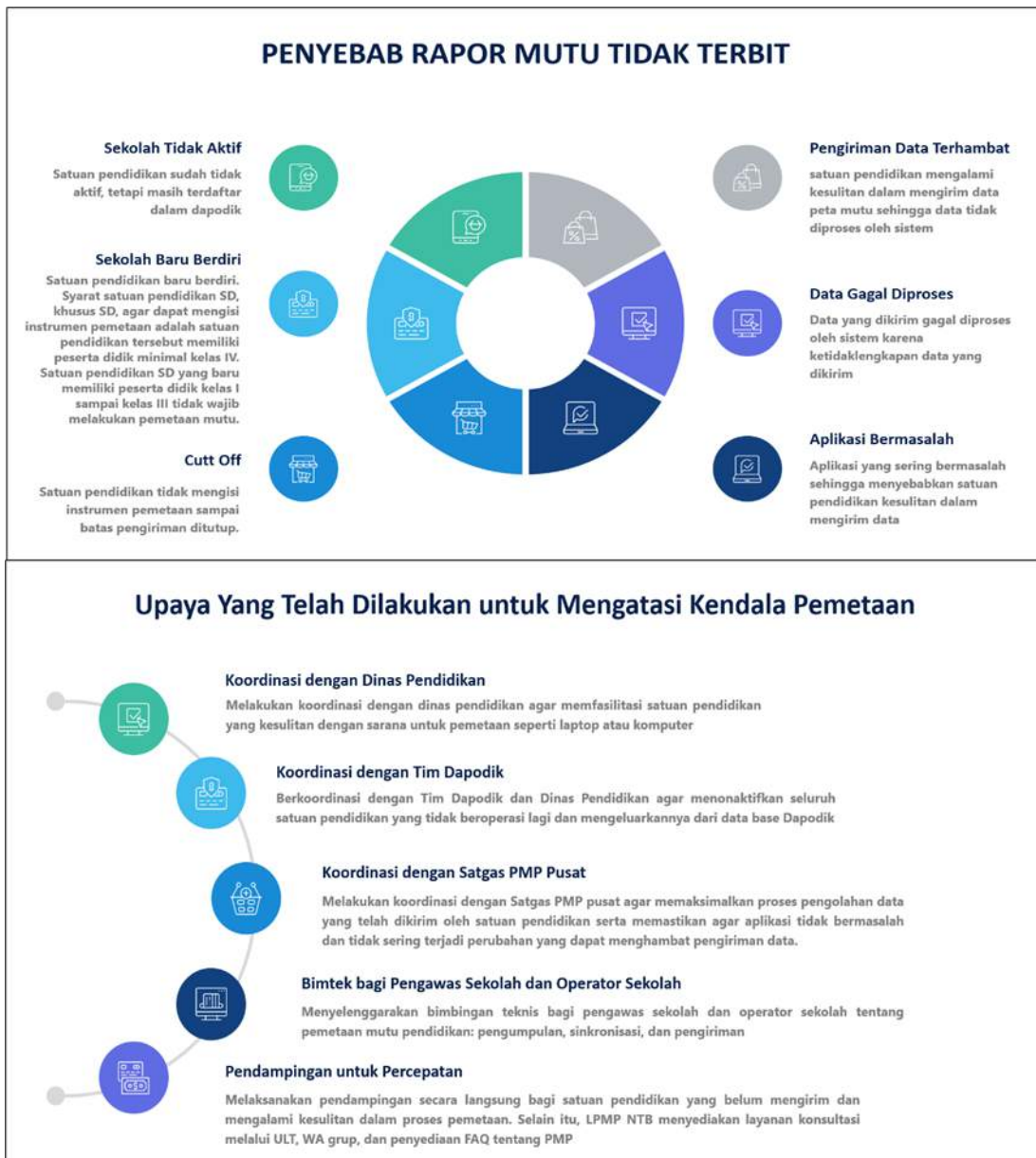
Gambar 3.7. menunjukkan sebaran nilai kinerja 287 satuan pendidikan jenjang SMA. Secara umum, nilai kinerja berkelompok di sebelah kanan dengan nilai rata-rata sebesar 6,496. Nilai minimum dan maksimum masing-masing 1,584 dan 6,820. Ada 140 SMA yang memiliki nilai kinerja minimal 75 (lebih dari 6,59) dan sebanyak 63% SMA memiliki nilai kinerja lebih dari nilai rata-rata. Pada tingkat kabupaten/kota, data pada Tabel 3.5, seluruh kabupaten/kota memiliki capaian kinerja melebihi target 26,5%. Capaian kinerja minimal terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dengan capaian sebesar 33,33% atau 125,79% dari target.

Tabel 3.5. Target dan Capaian Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Kinerja Minimal 75 Jenjang SMA Setiap Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan dengan Nilai Kinerja Minimal 75	Target	Capaian	Kesesuaian Target
Kab. Bima	47	22	26,50%	46,81%	176,64%
Kab. Dompu	25	14	26,50%	56,00%	211,32%
Kab. Sumbawa	23	18	26,50%	78,26%	295,32%
Kab. Lombok Timur	55	23	26,50%	41,82%	157,80%
Kab. Sumbawa Barat	9	7	26,50%	77,78%	293,50%
Kab. Lombok Tengah	48	16	26,50%	33,33%	125,79%
Kab. Lombok Utara	12	5	26,50%	41,67%	157,23%
Kab. Lombok Barat	26	13	26,50%	50,00%	188,68%
Kota Mataram	27	15	26,50%	55,56%	209,64%
Kota Bima	15	7	26,50%	46,67%	176,10%
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>287</b>	<b>140</b>	<b>26,50%</b>	<b>48,78%</b>	<b>184,08%</b>

### Kendala dan Solusi

Pengukuran kinerja dalam melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan menggunakan nilai rapor mutu sebagai ukuran kinerja satuan pendidikan. Rapor mutu diperoleh melalui serangkaian kegiatan pemetaan mutu yang melibatkan seluruh satuan pendidikan. Dalam proses pemetaan mutu, ada beberapa sekolah yang tidak kelaur rapor mutunya sehingga pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan. Ada beberapa kendala yang muncul pada saat melakukan pemetaan mutu seperti ditampilkan dalam infografis pada **Gambar 3.8**. LPMP Prov. NTB telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pemetaan sehingga dapat meminimalkan jumlah satuan pendidikan yang tidak terbit rapor mutunya.



**Gambar 3.8.** Info Grafis Penyebab Rapor Mutu Tidak Terbit dan Solusi

### Program LPMP Prov. NTB Pendukung IKK 1

Untuk melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan sasaran kinerja “Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan”, LPMP Prov. NTB telah melaksanakan berbagai program intervensi dalam bentuk fasilitasi, pendampingan, supervise, dan kemitraan. Pelaksanaan fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan, khususnya pada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan.

Pelaksanaan fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan dilaksanakan melalui program sekolah model pada satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, supervisi di seluruh satuan pendidikan, dan bimtek dalam jaringan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan melalui program sekolah model dan dilaksanakan pada 200 sekolah yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan realisasi 100%.

## 1. Pengembangan Sekolah Model dan Imbas.

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SMPE).

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai SPMI. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2020, LPMP Prov. NTB mengembangkan 175 sekolah model dan 875 sekolah imbas yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Tahun 2020,

Pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Selain itu, pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.

## 2. Bimbingan Teknis SPMI

LPMP Prov. NTB telah memberikan pendampingan implementasi SPMI kepada 175 sekolah model dan 875 sekolah imbas pada tahun 2020. Agar implementasi SPMI dapat dilakukan secara merata di semua sekolah, tidak hanya di sekolah model dan sekolah imbas SPMI, LPMP Prov. NTB telah memberikan bimbingan teknis SPMI kepada sekolah-sekolah di luar sekolah model dan sekolah imbas tahun 2020 Bimbingan teknis SPMI ini diberikan kepada 500 sekolah yang diwakili oleh masing-masing kepala sekolah dan satu orang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari di 10 kabupaten/kota.



**Gambar 3.9.** Kegiatan pendampingan implementasi SPMI sekolah model dan sekolah imbas Tahun 2020.

### 3. Supervisi

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai SPMI. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dilakukan kegiatan supervisi mutu pendidikan berkelanjutan oleh supervisor ke setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan supervisi mutu pendidikan mencakup supervisi integrasi penerapan Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Pembelajaran pada Masa Pandemi, dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan. Pada tahun 2020, LPMP Prov. NTB telah melaksanakan supervisi ke 4.789 satuan pendidikan. Supervisi tersebut dilakukan oleh setiap pengawas pembina masing-masing sekolah.

## Indikator Kinerja #1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

**Tabel 3.6.** Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024	% capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%		
5%	5,82%	116,4%	5%	116,4%

Untuk pemenuhan Indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk terukur ditahun 2020 ini berdasarkan hasil raport mutu 2019. Hal yang menjadi pertimbangan karena sampai saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum melaksanakan Asesmen Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei karakter.

Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk diperoleh dengan menentukan *threshold* (ambang batas) nilai rapor mutu untuk menentukan sekolah dengan kinerja terbaik dan *threshold* (ambang batas) nilai rapor mutu untuk menentukan sekolah dengan kinerja terburuk. Dikarenakan tidak adanya ketentuan ataupun indikator untuk menentukan hal tersebut diatas, maka Setditjen Paud dikdasmen menentukan nilai sendiri, yaitu ambang batas untuk kinerja terbaik adalah: 6,75 dan ambang batas untuk kinerja terburuk adalah 6,13.

Berdasarkan sebaran hasil peta mutu pendidikan tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diperoleh informasi pada tabel berikut.

**Tabel 3.7.** Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk tahun 2020.

Jenjang	Jumlah satuan pendidikan Keseluruhan	Jumlah Satuan Pendidikan yang berada pada Batas atas $\geq 6,75$ dan Batas Bawah $\leq 6,13$	Kesenjangan antara batas atas dan batas bawah (%)
SD	2850	65	2,28
SMP	817	120	14,69
SMA	287	45	15,68
Total	3954	230	5,82

Dari tabel diatas, diperoleh Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk terukur di tahun 2020 ini berdasarkan hasil raport mutu 2019 untuk seluruh jenjang adalah 5,82%. Terjadi kesenjangan yang rendah di jenjang SD, dapat dimaknai bahwa tingkat kesenjangan kinerja terbaik dan kinerja terburuk sangat rendah. Terjadi kesenjangan yang sangat tinggi pada jenjang SMP (14,68%) dan SMA (15,68%), dapat dimaknai bahwa tingkat kesenjangan kinerja terbaik dan kinerja terburuk sangat tinggi.

Berdasarkan persentase kesenjangan pada jenjang SD yang mencapai 2,28%, dapat dimaknai bahwa jumlah sekolah yang berkinerja terbaik dan terburuk sangat kecil. Kecilnya persentase jumlah sekolah yang berkinerja terbaik dan terburuk disebabkan beberapa kendala antara lain:

1. Sebagian besar SD didominasi oleh guru non PNS. Untuk guru SD PNS sebgagain besar sudah berusia diatas 50 tahun.
2. Penyebaran jumlah guru PNS masih cenderung berada di daerah perkotaan, sedangkan sebaran guru PNS di daerah pedesaan dan terpencil sangat kecil jumlahnya.
3. Rasio jumlah guru PNS dan bersertifikasi di daerah pedesaan dan terpencil sangat kecil.

Solusinya:

1. Perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi guru terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil.
2. Melakukan penyebaran guru PNS yang berimbang di setiap satuan pendidikan yang ada di daerah perkotaan dan pedesaa serta terpencil.
3. Pengadaan guru dari PPPK yang ditempatkan didaerah pedesaan dan terpencil.

Berdasarkan persentase kesenjangan pada jenjang SMP yang mencapai (14,68%) dan SMA (15,68%), dapat dimaknai bahwa jumlah sekolah yang berkinerja terbaik dan terburuk cukup banyak. persentase jumlah sekolah berkinerja terbaik dan terburuk yang mencapai diatas 10% disebabkan beberapa hal antara lain:

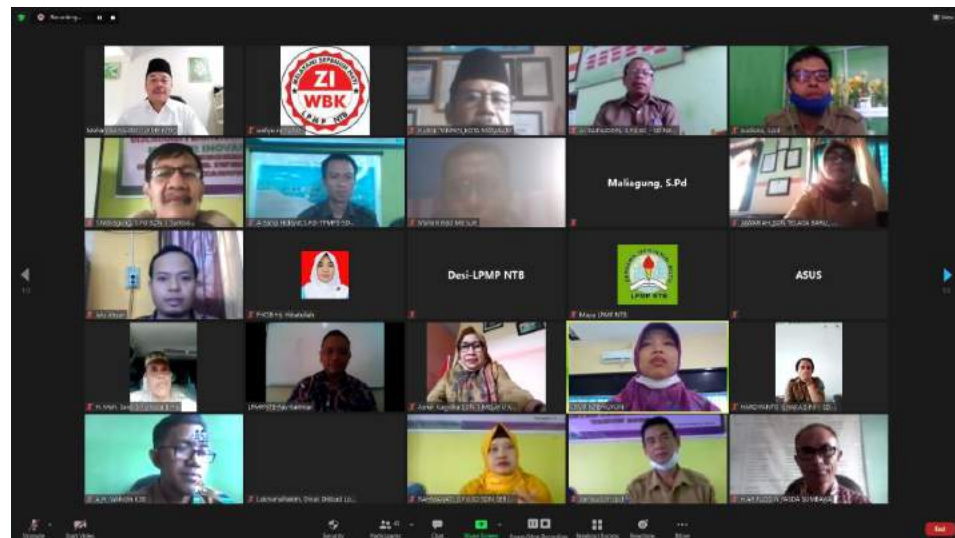
1. Jumlah guru cenderung terpenuhi untuk semua mata pelajaran di setiap satuan pendidikan. Sudah berkualifikasi S1 Pendidikan sesuai mata pelajaran dan PNS.
2. Sebagian besar sekolah berada di wilayah perkotaan dan kecamatan, sehingga akses maupun kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan terhadap upaya peningkatan kinerja sekolah cukup tersedia (jalan, internet dan infrastruktur).

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan:

1. Mengupayakan sekolah berkinerja terbaik sebagai sekolah yang mampu menggerakkan sekolah lain dalam bentuk pendampingan dan pembinaan antar satuan pendidikan.
2. Mensosialisasikan berbagai upaya terbaik yang sudah dilakukan oleh sekolah berkinerja terbaik kepada sekolah berkinerja terburuk dan baik. Sosialisasi diharapkan mampu menginspirasi sekolah lainnya untuk berlaku dan berkinerja yang sama pula.

Berdasarkan uraian kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk setiap jenjang pendidikan dapat disimpulkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Pengukuran AKM dan survey karakter kepada peserta didik merupakan hal baru dilakukan pada tahun 2020 yang merupakan pengganti Ujian Nasional;
2. Masa pandemi Covid 19 yang mengakibatkan proses pembelajaran tatap muka di sekolah ditiadakan sementara sehingga menjadi sulit untuk memperoleh ataupun mengukur data/nilai AKM dan survey karakter;
3. Pemahaman tentang AKM dan survey karakter dari pendidik dan tenaga kependidikan serta pemangku kepentingan terkait masih belum merata;
4. Belum terdata jumlah satuan pendidikan yang memiliki kesiapan sarana prasarana dalam mendukung AKM dan survey karakter;



**Gambar 3.10.** Sosialisasi AKM dan Survey Karakter pada seluruh Satuan Jenjang Pendidikan secara daring.

Sedangkan alternatif upaya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. AKM yang berubah menjadi Aseesmen Nasional belum dapat dilaksanakan tahun 2020 sehingga capaian AKM tahun 2020 menggunakan pendekatan rapor mutu tahun 2019;
2. Sosialisasi Penyelenggaraan AKM dan Survey Karakter kepada Sekolah Binaan dan Sekolah Imbas jenjang SD, SMP dan SMA pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui moda daring;

3. Merumuskan metode/cara pengukuran indikator kinerja yang tepat sebagai langkah antisipasi jika pusat Assesmen dan Pusat Penguatan Karakter belum dapat mengeluarkan data capaian AKM dan Survey Karakter;
4. Menyusun aksi/kegiatan yang tepat sehingga dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan;
5. Menyusun instrumen survey terkait persiapan infrastruktur satuan pendidikan, Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam mendukung pelaksanaan AKM dan Survey Karakter.

### Indikator Kinerja #1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan.

Program perencanaan pendidikan nasional merupakan salah satu bagian penting dalam proses mewujudkan rencana strategis pembangunan pendidikan nasional, yaitu: peningkatan akses, mutu, tata kelola dan akuntabilitas pendidikan nasional. Untuk membangun program perencanaan pendidikan yang valid, terukur dan berkesinambungan diperlukan data-data pendukung yang lengkap, valid, akuntabel, dan terbaru (*up to date*). Berangkat dari kebutuhan tersebut, pada awal tahun 2006 Biro Perencanaan Setjen Depdiknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun sistem pendataan dimana proses transaksi yang mengatur administrasi tiap satuan pendidikan dilakukan dalam skala mikro secara terpusat, daring (*online*) dan dalam waktu-nyata (*real time*) dikenal dengan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Aplikasi Dapodik ini dirancang menggunakan basis open source dengan menerapkan sistem database terpusat dan aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses dan dioperasikan secara langsung *online* dan *real time* oleh seluruh Satuan Pendidikan, Kantor Dinas Pendidikan Propinsi/Kota/Kabupaten se-Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) jenis data utama pendidikan yang dikelola pada sistem dapodik, meliputi: data sekolah, data siswa dan data pendidik dan tenaga kependidikan. Proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara langsung *online* dan *real-time* sehingga diperoleh data yang akurat, terbaru, dan berkelanjutan. Data dinyatakan **akurat** jika setiap data isian dari identitas sekolah terisi dengan benar dan wajar. Data dinyatakan **terbaru** jika indikator rapor PTK, peserta didik, rombongan belajar telah terbaru/mutakhir pada semester berjalan. Data dinyatakan **berkelanjutan** jika sekolah melakukan sinkronisasi dapodik berturut-turut selama 4 semester terakhir.

Keberhasilan capaian indikator kinerja berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang akurat, terbaru dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2020 diketahui tingkat capaian ringkasan/final adalah 95,59% dibawah capaian nasional dengan rata-rata 96,34%. Secara detail capaian indikator berdasarkan Dapodik untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8.** Persentase data Dapodik yang akurat, terbaru dan berkelanjutan Provinsi NTB Tahun 2020.

No	Wilayah	Ringkasan	Akurat	Berkelanjutan	Mutakhir
1	Kab. Sumbawa Barat	96.67	93.04	98.87	98.09
2	Kab. Sumbawa	96.34	91.24	98.92	98.87
3	Kab. Bima	95.89	90.81	98.93	97.94
4	Kab. Lombok Timur	95.71	91.43	97.58	98.12

5	Kab. Dompu	95.63	90.13	99.7	97.06
6	Kab. Lombok Tengah	95.57	90.88	98.05	97.79
7	Kota Mataram	95.13	91.33	98.07	96
8	Kab. Lombok Utara	95.12	90.12	97.67	97.57
9	Kab. Lombok Barat	94.96	90.42	97.83	96.64
10	Kota Bima	94.85	90.8	98.15	95.59
	<b>Nasional</b>	<b>96.34</b>	<b>92.03</b>	<b>98.84</b>	<b>98.16</b>
	<b>NTB</b>	<b>95.59</b>	<b>91.02</b>	<b>98.38</b>	<b>97.37</b>

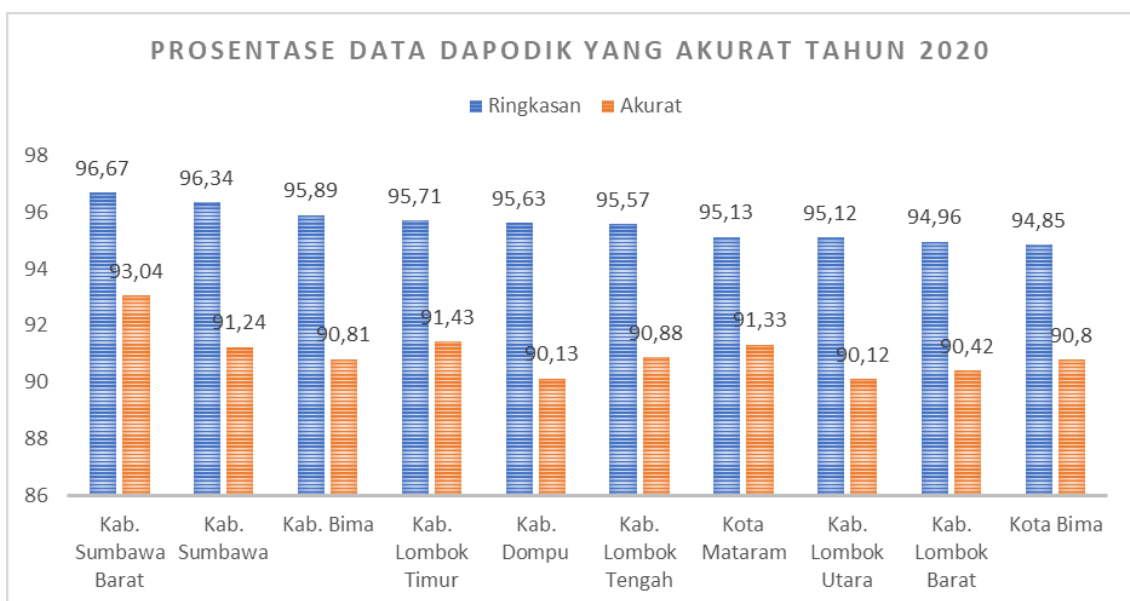
Sumber Data: <http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rapor/> Per 2021-01-11 22:50:51.867

#### A.1. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat.

**Tabel 3.9.** Target, Realisasi dan Capaian Data Dapodik yang Akurat

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024	% capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%		
95%	91,02%	95,81%	95,8%	95,01%

Capaian indikator persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan semester II tahun 2020 mencapai 91,02% dari target 95%. Sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 95,81%. Hambatan/kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target diantaranya (1) aplikasi dapodik yang terus menerus mengalami perubahan versi, menyebabkan entrain data terhambat juga terjadi perubahan dan perpindahan menu, (2) kemampuan operator sekolah tentang barang milik negara terbatas, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman operator dalam penggunaan aplikasi, dan (3) operator sekolah yang sering berganti-ganti.



**Gambar 3.11.** Capaian data Dapodik yang akurat dari setiap kabupaten.

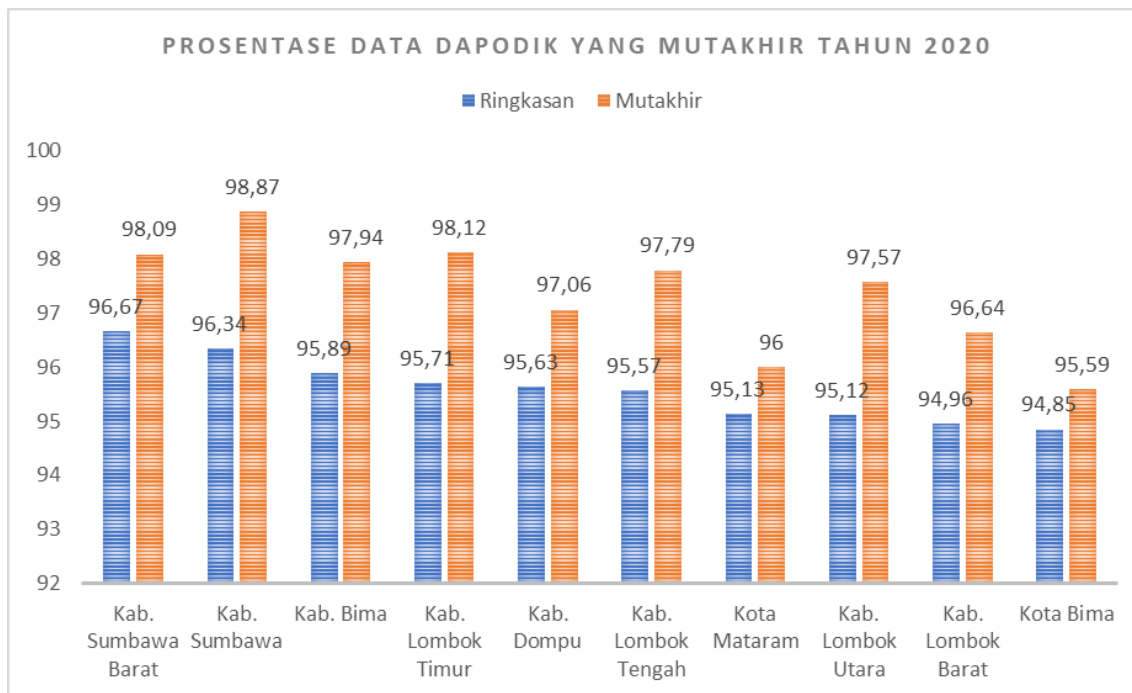
Persentase data Dapodik yang akurat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, capaian tertinggi di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 93,04 %. Capaian terendah di Kabupaten Lombok Utara yaitu 90,12%.

**A.2. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah yang mutakhir/terbarukan.**

**Tabel 3.10.** Target, Realisasi dan Capaian Data Dapodik yang Mutakhir.

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024	% capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%		
95%	97,37%	102,17%	95,8%	101,63

Capaian indikator persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang terbaru/mutakhir untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan semester II tahun 2020 mencapai 97,37% dari target 95%. Sehingga persentase capaian untuk indikator mutakhir atau terbaru melewati target yang sudah ditetapkan.



**Gambar 3.12.** Capaian data Dapodik yang Mutakhir dari setiap kabupaten

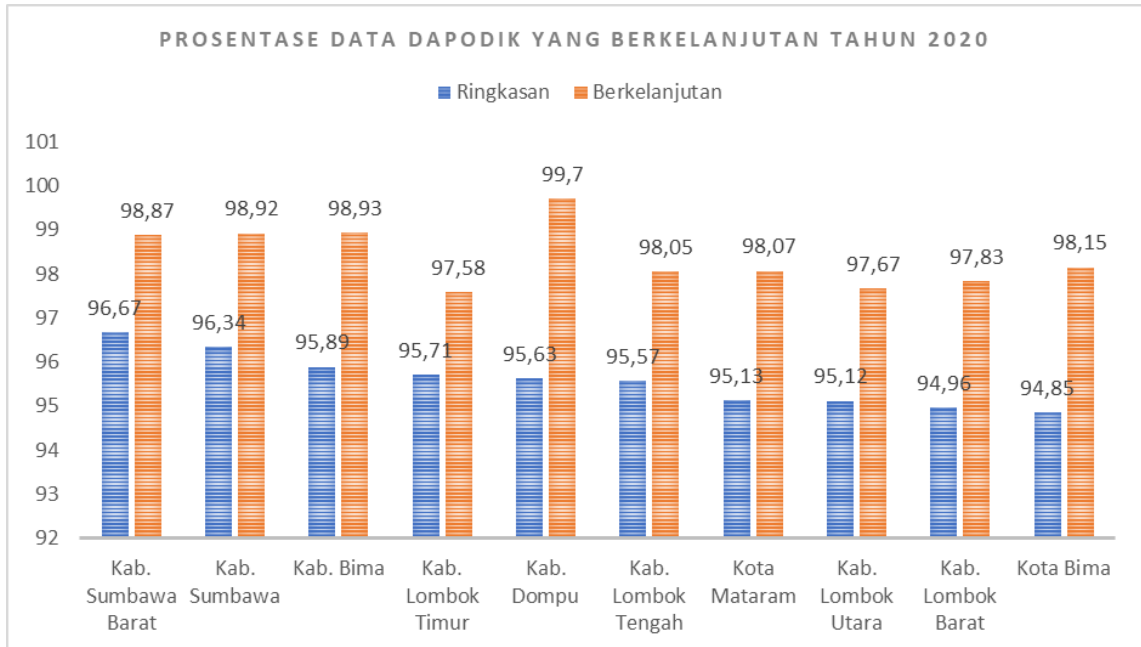
Persentase data Dapodik yang terbaru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, capaian tertinggi di Kabupaten Sumbawa sebesar 98,87%. Adapun capaian terendah adalah di Kota Bima yaitu 95,59%. Namun angka ini tetap melewati target capaian untuk tahun 2020.

**A.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah yang berkelanjutan.**

**Tabel 3.11.** Target, Realisasi dan Capaian Data Dapodik yang Berkelanjutan

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024	% capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%		
95%	98,38%	103,55%	95,8%	102,69

Capaian indikator persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang berkelanjutan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan semester II tahun 2020 mencapai 98,38% dari target 95%. Sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 103,50%. Secara umum untuk indikator data yang berkelanjutan semua kabupaten telah melampaui target, seperti yang tergambar pada grafik berikut.



**Gambar 3.13.** Capaian data Dapodik yang berkelanjutan dari setiap kabupaten

Persentase data Dapodik yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, capaian tertinggi di Kabupaten Dompu sebesar 99,7%. Capaian terendah di Kabupaten Lombok Timur yaitu 97,58%.



**Gambar 3.14.** Kegiatan Workshop Pengumpulan dan Pengolahan Data Mutu Pendidikan Prov. NTB Tahun 2020.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar indikator kinerja kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat dapat tercapai antara lain:

- Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan dengan metode jarak jauh (*video conference*).

- Dinas pendidikan memfasilitasi sekolah dan operatornya melalui pelatihan, bimbingan teknis, ataupun pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan operator terhadap pendataan sarana prasarana sekolah yang benar.
- Sekolah agar kiranya tetap mengembangkan pengetahuan operator melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- Memberikan pemahaman terhadap guru-guru betapa pentingnya berkas mereka dalam hal pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik.
- Sering bergantinya operator sekolah menyebabkan kualitas data menjadi berpengaruh, langkah yang perlu dilakukan yakni dengan memperbaiki kesejahteraan operator baik oleh dinas pendidikan maupun sekolah.

## Sasaran #2 Terwujudnya tata kelola LPMP Prov. Nusa Tenggara Barat yang baik.

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis diperlukan dukungan dari tata kelola LPMP Prov. NTB yang baik. Pelaksanaan tata kelola LPMP Prov. NTB yang baik tahun 2020 dilihat dari Predikat SAKIP yang diperoleh LPMP Prov. NTB dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 2020.

### Indikator Kinerja #2.1 Predikat SAKIP LPMP Prov. Nusa Tenggara Barat.

Predikat SAKIP untuk Unit Pelaksana Teknis di keluarkan oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen pada akhir tahun anggaran. Nilai SAKIP LPMP Prov. NTB tahun 2020 sebesar 80,21. Berikut perbandingan nilai SAKIP LPMP Prov. NTB tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 3.12.** Capaian nilai SAKIP LPMP Prov. NTB tahun 2019 dan 2020.

Target	Tahun 2019		Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024
	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Target	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	
B	75,9	BB	BB	80,21	A	A



**Gambar 3.15.**  
Kegiatan Penyusunan Kinerja LPMP Prov. NTB Tahun 2020.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan nilai dan predikat SAKIP di tahun 2020 antara lain:

1. Penyampaian Laporan Kinerja LPMP Prov. NTB tahun 2019 dengan tepat waktu;
2. Penyusunan rencana strategis 2020-2024;
3. Penandatanganan Perjanjian Kinerja mulai dari Kepala LPMP, Pejabat Struktural sampai dengan staf;
4. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan LPMP Prov. NTB, sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi.



Sebagian foto diambil sebelum masa Pandemi Covid-19.

**Gambar 3.16.** Derap Langkah pencapaian ZI-WBK LPMP Prov. NTB.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan nilai dan predikat SAKIP di tahun 2020 antara lain:

- Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra belum dilengkapi Indikator Tujuan dan Target Keberhasilan.
- Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja belum dilakukan secara berkala (triwulan).
- Informasi pada Laporan Kinerja belum dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (targetPK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) belum dilakukan secara berkala (minimum triwulan).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian nilai SAKIP antara lain:

- Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dilengkapi Indikator Tujuan dan Target Keberhasilan. Rumusan Indikator Tujuan dan Target dapat mengacu pada Indikator Kinerja (IKSS/IKP) dan target Indikator Kinerja (target IKSS/IKP pada akhir periode Renstra) pada unit kerja di atasnya.
- Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja.

- Informasi pada Laporan Kinerja dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (targetPK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja. Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/penanggungjawab kegiatan.

## Indikator Kinerja #2.2 Nilai Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan RKA-K/L.

Nilai kinerja anggaran LPMP Prov. NTB tahun 2020 dilihat dari nilai IKPA (Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran) dan EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran). Nilai kinerja anggaran LPMP Prov. NTB di tahun 2020 sudah mencapai target dan mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Berikut perbandingan nilai kinerja anggaran LPMP Prov. NTB tahun 2019 dan 2020.

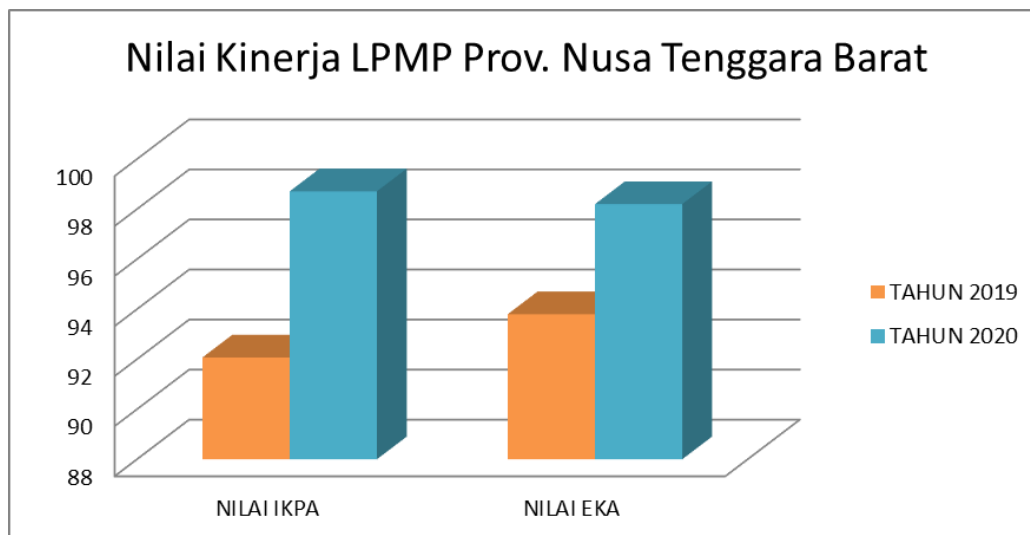
**Tabel 3.13.** Nilai kinerja anggaran LPMP Prov. NTB tahun 2019 dan 2020.

Tahun 2019		Tahun 2020	
Nilai IKPA	Nilai EKA	Nilai IKPA	Nilai EKA
92,07	93,8	98,71	98,2

**Tabel 3.14.** Target, Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%		
81	98,45	121,55%	85	115,82%

\*Nilai kinerja anggaran didasarkan pada rata-rata komulatif IKPA dan EKA.



**Gambar 3.17.** Grafik nilai kinerja LPMP Prov. NTB.

Kegiatan/program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Reviu RKA LPMP Prov. NTB Tahun 2020 secara berkala.
2. Penyusunan RKAKL tahun 2021.
3. Penyusunan laporan daya serap.



**Gambar 3.18.** Kegiatan Reviu RKA LPMP Prov. NTB 2020 Triwulan III.

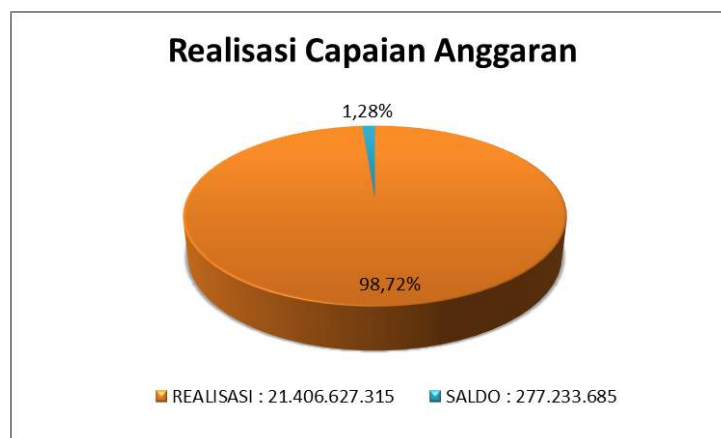
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan nilai kinerja anggaran antara lain:

- Adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan perubahan rencana dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
- Perubahan numenklatur menyebabkan pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan jadwal. Kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan di awal tahun menjadi diundur.
- Belanja modal baru di buka blokirnya di bulan Juli 2020, sehingga pelaksanaan pengadaan mengalami perubahan dari rencana sebelumnya.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian nilai kinerja anggaran antara lain memastikan output yang dihasilkan dapat tercapai sesuai target, mengoptimalkan penyerapan anggaran dan efisiensi anggaran.

### B. Realisasi Anggaran.

Pagu anggaran LPMP Nusa Tenggara Barat tahun 2020 sebesar Rp. 21.683.861.000,00 yang terserap sebesar Rp. 21.406.627.315,00 atau sebesar 98,72 %. Pagu tersebut mengalami empat kali pemotongan dari pagu awal sebesar Rp. 37.846.323.000,00. Dari pagu awal tersebut sejumlah Rp. 10.431.217.000,00 atau sebesar 27,56 % adalah pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Sasaran Kinerja 1.

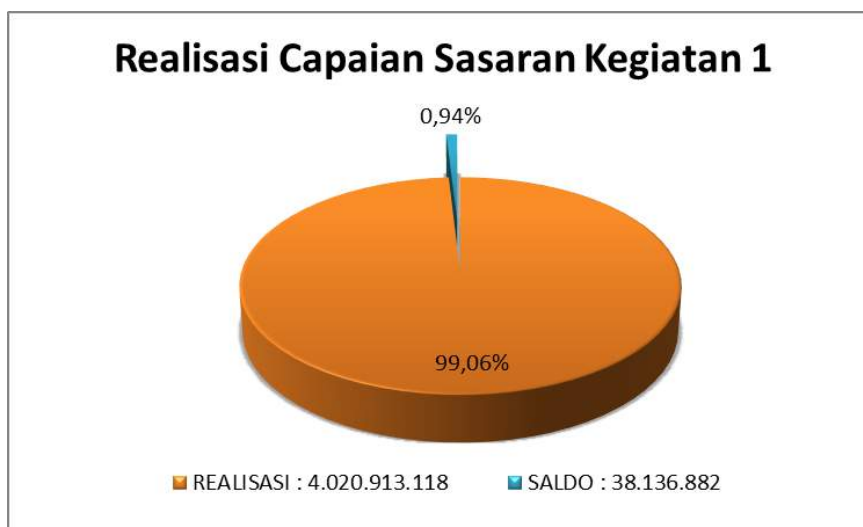


**Gambar 3.19.** Realisasi Penyerapan Anggaran LPMP Prov. NTB tahun 2020.

Pagu sebesar Rp. 21.683.861.000,00 digunakan untuk membiayai pencapaian satu sasaran dengan tiga indikator kinerja kegiatan, seperti ditunjukkan pada **Tabel 3.15**. Berikut rincian penyerapan anggaran pada Sasaran Kegiatan 1:

**Tabel 3.15.** Akuntabilitas Keuangan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
SK1. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	4.059.050.000	4.020.913.118	99,06
	IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk			
	IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan			



**Gambar 3.20.** Grafik Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Kegiatan 1.

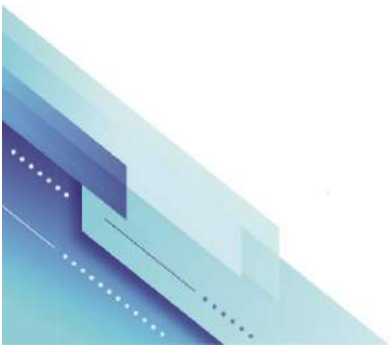
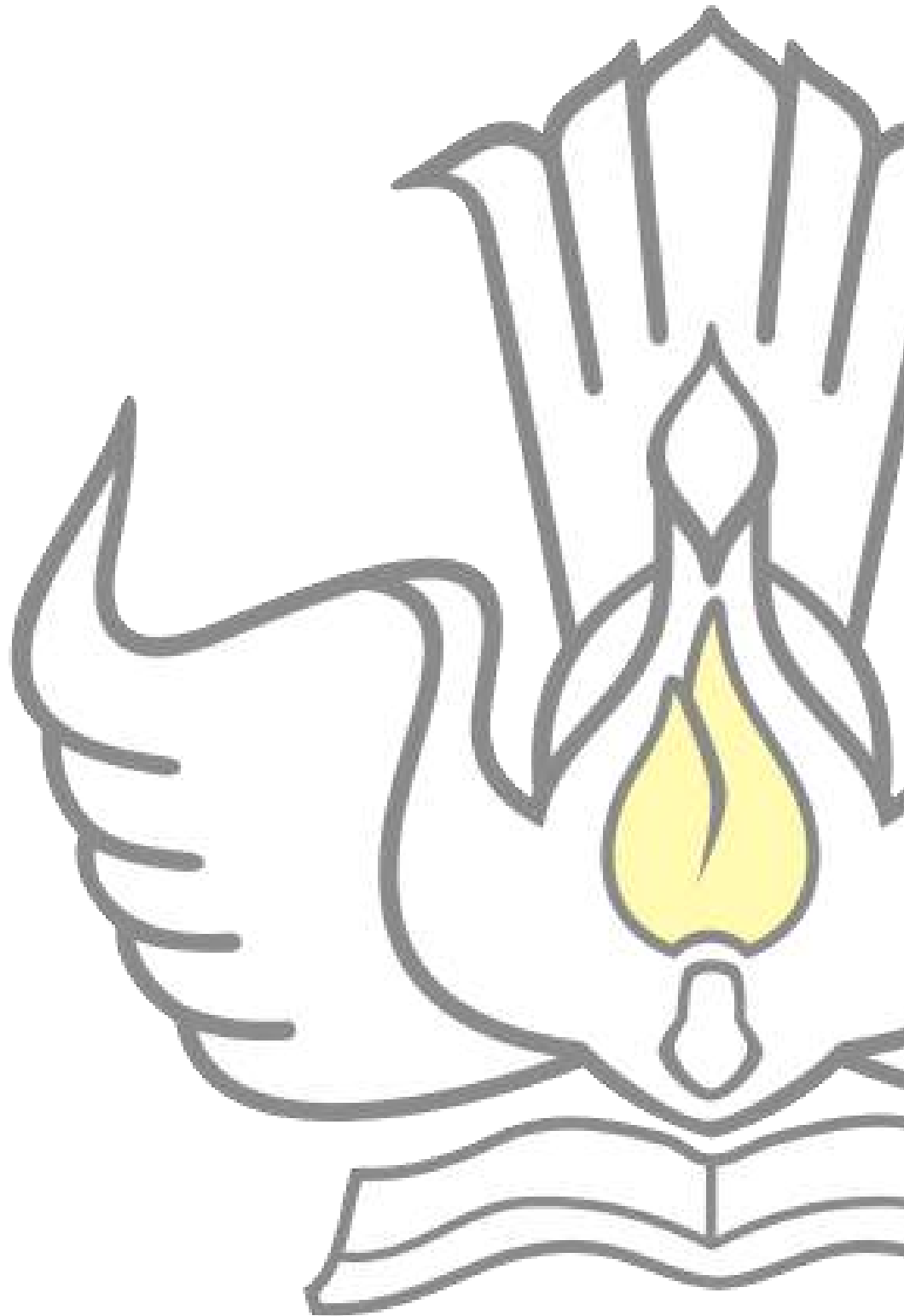
*\*Capaian anggaran sebesar 99,06% tidak termasuk anggaran pada Sasaran Kegiatan 2 “Terwujudnya tata kelola LPMP Prov. Nusa Tenggara Barat yang baik”.*

### Efisiensi Anggaran

Di tahun 2020 LPMP Nusa Tenggara Barat telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 16,93 %. Perhitungan efisiensi tersebut berdasarkan pengeluaran seharusnya dibandingkan dengan pengeluaran sebenarnya sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari perubahan metode kegiatan, yaitu dari metode tatap muka secara langsung menjadi metode zoom meeting. Metode ini mengefisiensi biaya perjalanan dinas dan biaya belanja bahan.

LPMP Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 telah melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 1.499.445.000,00 untuk mendukung Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan. Optimalisasi anggaran yang telah dilakukan

digunakan untuk Kegiatan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Daring, Sosialisasi Pengumpulan Data Pemetaan Mutu melalui Daring, Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas Sekolah melalui Daring, Penyusunan Program Kerja Sekolah Binaan melalui Daring, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah melalui Daring, Diseminasi Hasil Jenjang Dikdas dan Dikmen melalui Daring, Bimbingan Teknis Operator Dapodik dan Pengawas Sekolah, Rapat Koordinasi PPDB LPMP Nusa Tenggara Barat melalui Daring, Finalisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Pemantauan Pelaksanaan PPDB Jenjang Dikdas, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Hasil Pengawas dan Pelayanan Umum.



# Bab IV

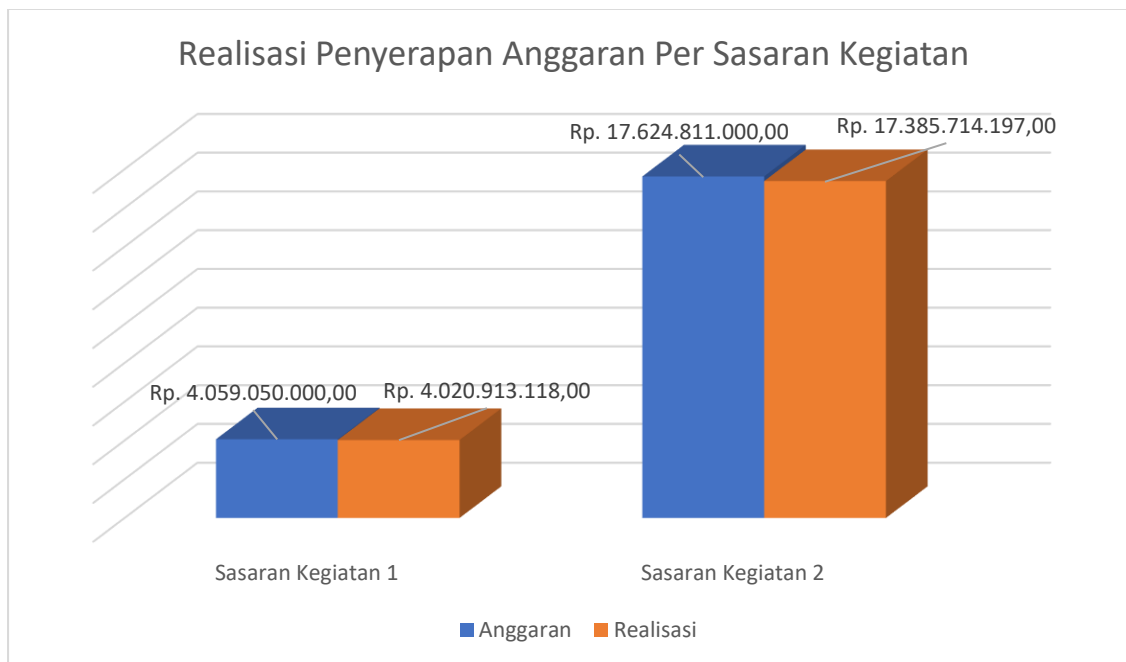
# Penutup



Selama tahun 2020, LPMP Prov. NTB berhasil melaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja anggaran.



Gambar 4.1. Capaian IKK Tahun 2020.



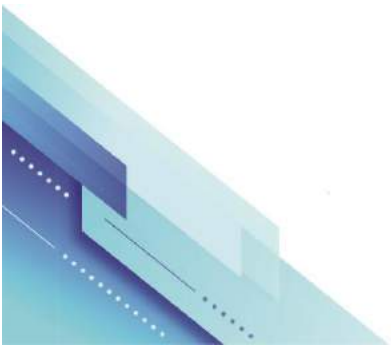
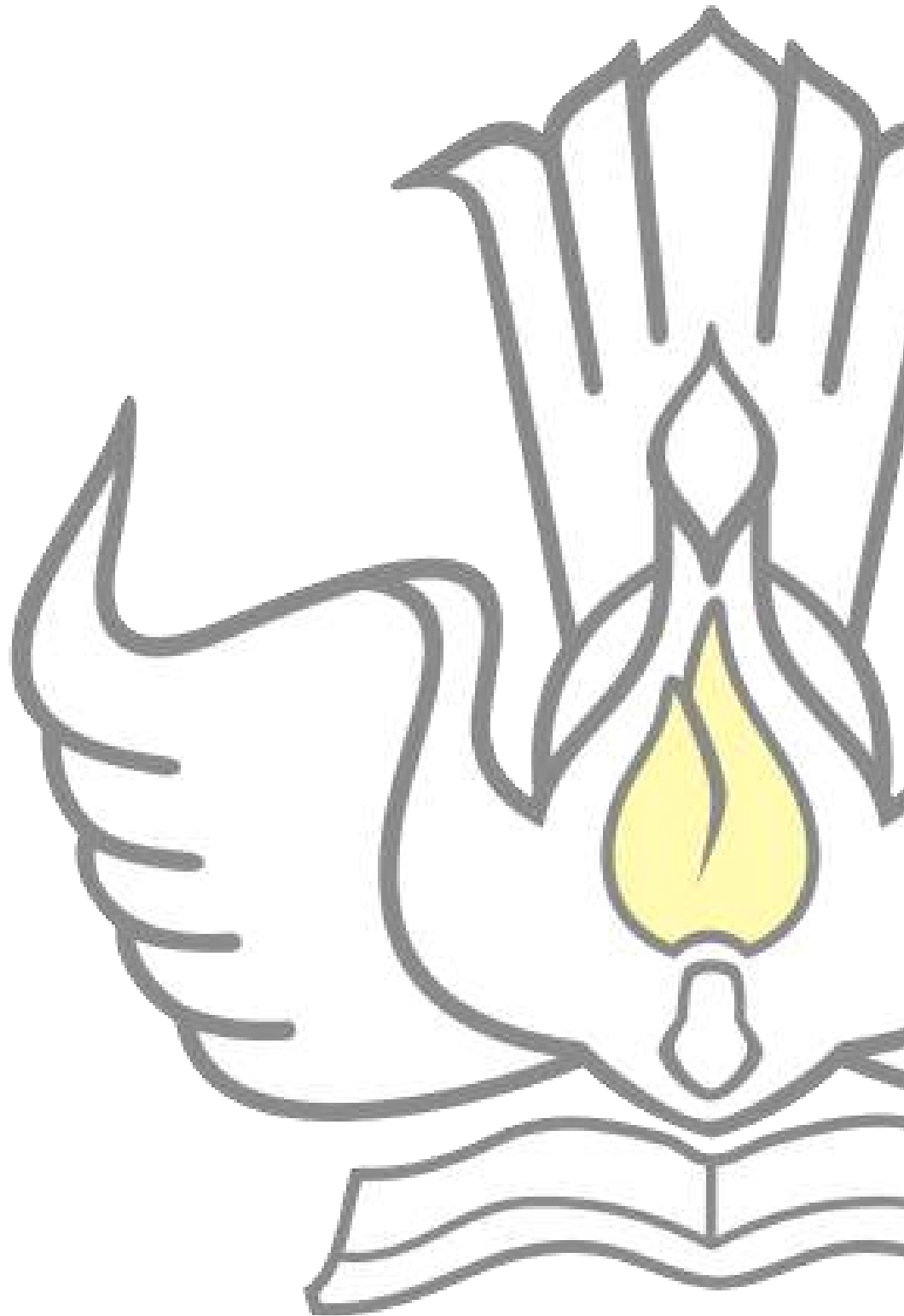
Gambar 4.2. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Sasaran Kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, maka berbagai permasalahan yang sempat muncul dan berpengaruh negatif terhadap pencapaian kinerja instansi perlu diantisipasi dengan menempuh langkah-langkah taktis dan strategis seperti:

1. Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait utamanya dengan instansi yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran tim SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) dalam mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan.

3. LPMP Nusa Tenggara Barat mengharapkan satgas PMP pusat dapat menampilkan raport peta mutu sesuai dengan jadwal.
4. Perlu adanya apresiasi bagi satuan pendidikan terkait dengan kualitas data hasil pemetaan mutu pendidikan.
5. Penyusunan dan pelaksanaan jadwal kegiatan yang melibatkan satuan pendidikan harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lain seperti jadwal ujian nasional dan semester, akreditasi, libur sekolah, dan lain-lain.
6. Perlunya sinergitas yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah serta semua pemangku kepentingan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam bidang penjaminan mutu pendidikan.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2020 merupakan landasan kuat bagi LPMP Prov. NTB untuk melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi acuan agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



# Lampiran - Lampiran.

1. Perjanjian Kinerja LPMP Prov. NTB Tahun 2020.
2. Pengukuran Kinerja.
3. Surat Pernyataan Telah direviu.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)**  
**Nusa Tenggara Barat**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,**  
**Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD MUSTARI

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMID MUHAMMAD

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan  
Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan  
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,

HAMID MUHAMMAD

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat,

MOHAMAD MUSTARI

**TARGET KINERJA**

	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	26,5 % 5,0% 95,0%
2.	Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik	2.1. Predikat SAKIP LPMP Nusa Tenggara Barat 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	BB 81

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kegiatan/Output	Anggaran (Rp)
1.	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	461.760.000
2.	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	1.562.200.000
3.	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	1.895.650.000
4.	Satuan Pendidikan yang terverifikasi Mutu Pendidikannya	921.200.000
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	699.900.000
6.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.970.728.000
7.	Layanan Perkantoran	14.808.068.000
	Jumlah	23.319.506.000

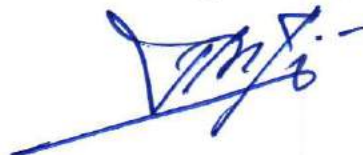
Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan  
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,



HAMID MUHAMMAD

Kepala Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan (LPMP)  
Nusa Tenggara Barat,



MOHAMAD MUSTARI



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Mustari, Ph.D

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP., M.Si


Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

  
Jumeri, S.TP., M.Si

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan Provinsi Nusa  
Tenggara Barat



Mohamad Mustari, Ph.D



2009170538205

**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	23.319.506.000
TOTAL			23.319.506.000

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

  
(Jumeri, S.TP., M.Si)Jakarta, Agustus 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan Provinsi Nusa  
Tenggara Barat  
(Mohamad Mustari, Ph.D)

2009170538205



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Mustari, Ph.D

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP., M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Jakarta, November 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan Provinsi Nusa  
Tenggara Barat



Jumeri, S.TP., M.Si



Mohamad Mustari, Ph.D



2012021407407

**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	21.683.861.000
TOTAL			21.683.861.000

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

  
(Jumeri, S.TP., M.Si)Jakarta, November 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan Provinsi Nusa  
Tenggara Barat  
(Mohamad Mustari, Ph.D)

2012021407407

**PENGUKURAN KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi	(Penyerapan )%
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	26,50%	27,77%	104,79%			
		Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5,00%	5,82%	116,40%	4.059.050.000	3.719.664.068	91,64
		Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95,00%	95,59%	100,62%			
2.	Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik	IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP NTB	BB	A	-	17.624.811.000	15.653.569.691	88,82
		IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	81	98,45	121,54%			

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi laporan yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Mataram, 23 Januari 2021  
Ketua Tim Pereviu,

Dra. Hj. Sri Sukriyani  
NIP 196503201992032001





---

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2020**



[lmpntb.kemdikbud.go.id](http://lmpntb.kemdikbud.go.id)



LPMP NTB



@lmpnusatenggarabarat



lmp ntb



ULT LPMP NTB  
0811 3906 669

**LPMP PROVINSI NUSA TEGGARA BARAT**

Jln. Panjtilar Negara No. 08, Taman Sari,  
Ampenan, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat. 83114.